

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2023-2026

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra ini merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam perwujudan tata pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Daerah DIY.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral untuk lima tahun kedepan. Renstra ini mencakup Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2026, yang didukung dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan energi sumber daya mineral DIY.

Sehingga dengan Renstra ini, diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Rumusan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ini juga berdasarkan evaluasi capaian sasaran target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2023-2026 yang telah dikorelasikan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022, dengan visi "Mewujudkan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" yang juga selaras dengan produk perencanaan pembangunan lainnya, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ini akan dijadikan acuan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Energi Sumber Daya Mineral DI. Yogyakarta


ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 19710624 199803 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1 - 1
1.1. LATAR BELAKANG	1 - 1
1.2. LANDASAN HUKUM	1 - 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1 - 7
1.3.1.Maksud.....	1 - 7
1.3.2.Tujuan	1 - 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	1 - 7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	2 - 1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2 - 1
2.2. SUMBER DAYA.....	2 - 16
2.3. KINERJA PELAYANAN	2 - 18
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN	2 - 63
BAB 3 PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS.....	3 - 1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	3 - 1
3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	3 - 10
3.3.TELAAH RENSTRA K/L DAN OPD KABUPATEN/KOTA	3 - 10
3.3.1.Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3 - 10
3.3.2.Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	3 - 18
3.3.3.Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman	

Kota Yogyakarta	3 - 24
3.3.4. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	3 - 26
3.3.5. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan	
Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	3 - 29
3.3.6. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan	
Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	3 - 31
3.3.7. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan	
Permukiman Kabupaten Kulon Progo.....	3 - 32
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	3 - 35
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	3 - 44
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	4 - 1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5 - 1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TUJUAN DAN SASARAN.....	6 - 1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7 - 1
BAB 8 PENUTUP.....	8 - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2021	2 - 16
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Per 31 Desember 2021	2 - 17
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai Dinas PUP-ESDM DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021	2 - 17
Tabel 2. 4	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Gender	2 - 18
Tabel 2. 5	Kinerja Dinas PUPESDM DIY Tahun 2017-2022.....	2 - 19
Tabel 2. 6	Hasil Uji Air Limbah di Outlet IPAL	2 - 27
Tabel 2. 7.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi	2 - 29
Tabel 2. 8	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2021	2 - 29
Tabel 2. 9.	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	2 - 30
Tabel 2. 10.	Realisasi Pelayanan Air Limbah	2 - 31
Tabel 2. 11	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2021	2 - 32
Tabel 2. 12.	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	2 - 33
Tabel 2. 13.	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)	2 - 33
Tabel 2. 14.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum	2 - 35
Tabel 2. 15	Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2021....	2 - 36
Tabel 2. 16.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 - 38
Tabel 2. 17.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi.....	2 - 39
Tabel 2. 18.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah.....	2 - 40
Tabel 2. 19.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021	2 - 41
Tabel 2. 20.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2 - 42
Tabel 2. 21.	Capaian Indikator Kinerja	2 - 43
Tabel 2. 22.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Dengan Hunia yang Layak	2 - 44

Tabel 2. 23. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	2 - 45
Tabel 2. 24 SK Penangan Kumuh Provinsi D.I. Yogyakarta 2021	2 - 45
Tabel 2. 25. Penyebab keberhasilan/Kegagalan.....	2 - 49
Tabel 2. 26 Kinerja Program	2 - 50
Tabel 2. 27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik.....	2 - 51
Tabel 2. 28. Target Kinerja dan Realisasi Izin Air Tanah:	2 - 54
Tabel 2. 29. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra	2 - 56
Tabel 2. 30. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUP-ESDM DIY Kinerja Tahun 2017 – 2022	2 - 57
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPESDM DIY	3 - 5
Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3 - 17
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3 - 22
Tabel 3. 4 Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 24
Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 25
Tabel 3. 6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 26
Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.....	3 - 27
Tabel 3. 8 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.....	3 - 29
Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.....	3 - 30
Tabel 3. 10 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	3 - 32
Tabel 3. 11 Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Kabupaten Kulon Progo.....	3 - 33
Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo.....	3 - 33

Tabel 3. 13	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo	3 - 35
Tabel 3. 14	Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2019 - 2039 terhadap daya dukungnya.....	3 - 42
Tabel 3. 15	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2020 dirinci Menurut Kabupaten/Kota di DIY	3 - 43
Tabel 3. 16	Rincian Ketidakesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2020 dirinci Menurut Pemanfaatan di Kabupaten/Kota di DIY	3 - 43
Tabel 3. 17	Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB.....	3 - 49
Tabel 4. 1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	4 - 3
Tabel 5. 1.	Strategi dan Arah Kebijakan	5 - 2
Tabel 6 .1.	Rencana Program	6 - 2
Tabel 7. 1.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	7 - 2

DAFTAR GAMBAR

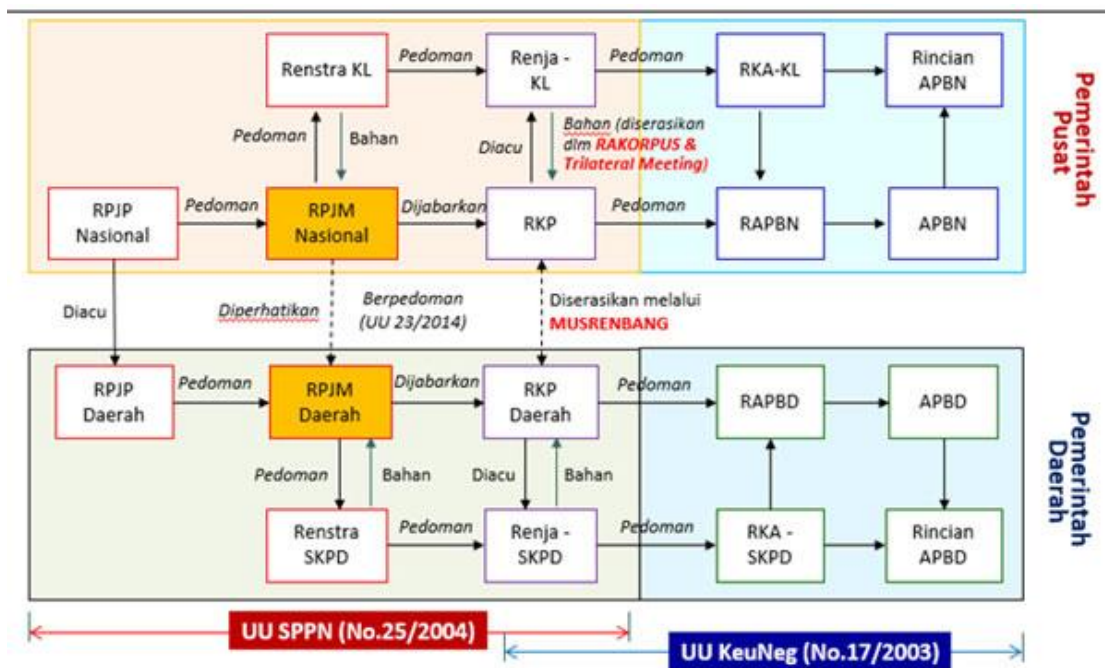
Gambar 1.1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	1 - 1
Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 - 2
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	2 – 2
Gambar 2.2. Diagram Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM Per 31 Desember 2021	3 – 16
Gambar 3.1. Daya Dukung Lingkungan DIY	3 – 40
Gambar 3.2. Daya Tampung Lingkungan DIY	3 – 40
Gambar 3.3. Persentase Wilayah berdasarkan klasifikasi Daya Dukung dan Tampun..	3 – 41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

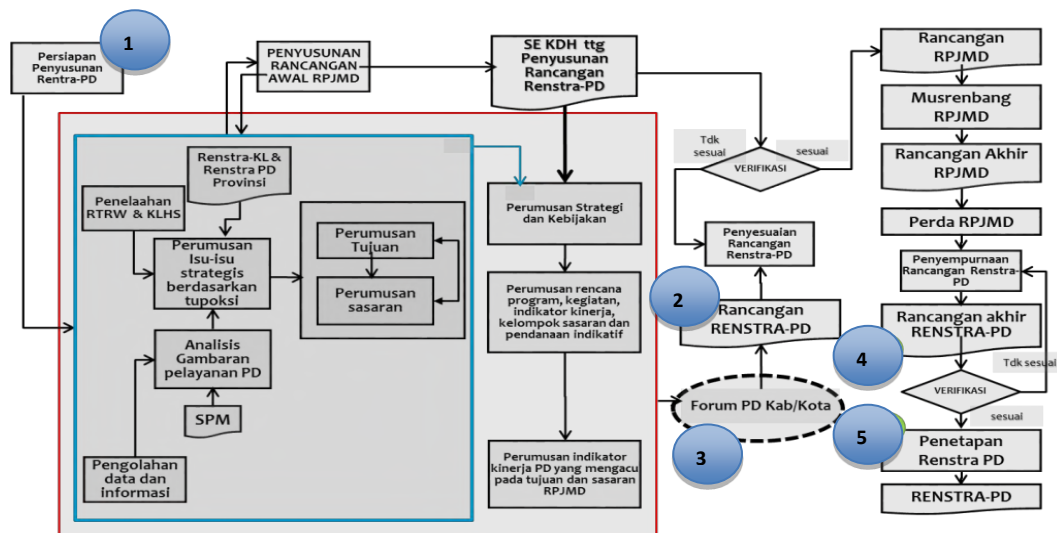
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari hierarki rencana pembangunan nasional sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



Gambar 1. 1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah.

Mengingat posisi strategis dokumen Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dihasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan.



Gambar 1. 2. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sesuai dengan tugas dan fungsi harus menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakaryaan serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, peningkatan akses energi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD meliputi :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017^[1] tentang^[2] Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia^[1] Nomor 23 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis^[1] Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

22. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Rensta Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunannya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta aturan turunannya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan turunannya;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta aturan turunannya;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta aturan turunannya;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan turunannya;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan turunannya;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta aturan turunannya;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mineral dan Batubara beserta aturan turunannya;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman beserta aturan turunannya;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2023-2026 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2023-2026 adalah :

- A. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY untuk mewujudkan tujuan dan sasaran urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- B. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY serta pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- C. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada periode mendatang.

Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bagian ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah terhadap renstra K/L dan renstra OPD Kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, telaah terhadap RTRW DIY dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran;

Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY beserta indikator kinerja.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan;

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup.

Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

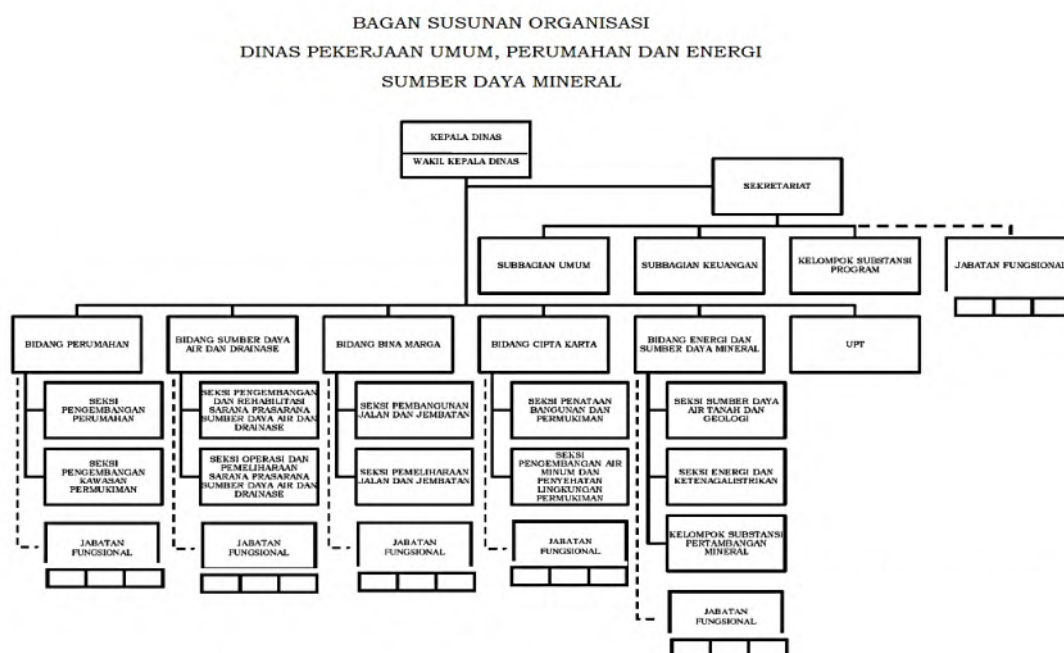
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah wajib dan pilihan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman serta energi sumberdaya mineral, dilaksanakan melalui tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub urusan Sumber Daya Air dan Jalan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib Daerah Provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) sumber daya air, 2) air minum, 3) persampahan, 4) air limbah, 5) drainase, 6) permukiman, 7) bangunan gedung, 8) penataan bangunan dan lingkungannya, 9) jalan, 10) jasa konstruksi
2. Urusan bidang perumahan dan permukiman merupakan urusan wajib Daerah Provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) perumahan, 2) kawasan permukiman, 3) perumahan dan kawasan permukiman kumuh, 4) prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) dan 5) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Urusan bidang energi dan sumber daya mineral, merupakan urusan pilihan daerah provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) geologi, 2) mineral dan batubara, 3) energi baru terbarukan dan 4) ketenagalistrikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai susunan Organisasi yang disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- c. penyiapan bahan dan pembinaan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- d. pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. pengembangan jasa konstruksi
- g. pengelolaan infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan;
- h. pengawasan dan pengendalian perizinan energi sumber daya mineral;
- i. fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman Kabupaten/ Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- k. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- l. pelaksanaankegiatankesekretariatan;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum,

- perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sesuai dengan struktur organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Jabatan Fungsional
 - e. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan
 - f. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - h. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - k. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - m. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
 - n. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - o. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

3. Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perurujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perumahan;

- c. pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan;
 - f. penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
4. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi dan pemenuhan ketersediaan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air dan drainase;
 - c. perencanaan teknis drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan drainase, operasi dan pemeliharaan irigasi dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - f. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - g. pengaturan dan pembinaan drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
 - h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian drainase, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;

- i. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air dan drainase;
 - j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebinamargaan untuk meningkatkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan penambahan jaringan jalan baru, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan;
 - d. pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta diseminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
 - h. penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
 - i. penyusunan data dan informasi Bidang Bina Marga;
 - j. pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi;
 - k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Marga; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keciptakaryaan untuk meningkatkan pengelolaan air curah pada sistem penyediaan air minum regional dan penanganan sampah sistem regional serta penanganan lokasi genangan dan iayanan sistem air limbah terpusat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan bangunan dan permukiman serta pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman
- c. pengembangan sistem penyediaan air minum regional, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik regional serta pengembangan sarana prasarana persampahan regional;
- d. penyelenggaraan bangunan gedung strategis, infrastruktur pada permukiman kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis;
- e. penyusunan data dan informasi Bidang Cipta Karya;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Cipta Karya ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik, bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi, mempertahankan rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman, dan penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. penetapan wilayah izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral
penyusunan bahan penetapan wilayah izin usahakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. perumusan kebijakan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- f. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta penjualan kelebihan tenaga listrik;
- g. penyediaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral;
- h. pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral;
- i. penyediaan sistem dan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. pengaturan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. pembinaan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- l. penyusunan data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. perumusan kebijakan penetapan nilai perolehan air tanah;
- n. penetapan tarif tenaga listrik dan pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- p. pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Adapun kewenangan dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan lima pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, Sistem informasi sumber daya air, dan peran serta masyarakat dan swasta.

Selain peran seperti tersebut diatas, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi dan pemenuhan ketersediaan air baku.

- b. Bidang Kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan jaringan jalan yang ada di wilayah DIY.

Peran tersebut untuk menunjang tupoksi Bidang Binamarga dalam melaksanakan pengelolaan kebinamargaan untuk meningkatkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan penambahan jaringan jalan baru.

- c. Bidang Keciaptakarya melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi:

- 1) Permukiman,
- 2) Air Minum,
- 3) Air Limbah,
- 4) Persampahan,
- 5) Drainase Lingkungan, dan

6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Peran tersebut untuk menunjang tupoksi Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan pengelolaan keciptakaryaan untuk meningkatkan pengelolaan air curah pada sistem penyediaan air minum regional dan penanganan sampah sistem regional serta penanganan lokasi genangan dan layanan sistem air limbah terpusat.

- d. Bidang Jasa Konstruksi, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi meliputi pelayanan pengujian konstruksi dan sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi serta pelayanan informasi permukiman dan bangunan.
- e. Bidang Perumahan, mempunyai peran untuk menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai peran melaksanakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik, bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi, mempertahankan rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman dan cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air dan penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdiri dari:

1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul ; dan
4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo.

Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, dan penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pengkajian dal penerapan teknologi bidang pekerjaan umum;
- e. pelayanan teknis pengujian dan penyelidikan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota serta pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai

Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
- b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman;
- c. pengendalian kualitas lingkungan;
- d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- e. pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum;
- f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, pengusahaan air tanah dan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta

- dan Gunungkidul;
- b. pengoperasian sarana dan prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
 - c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
 - e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;
 - f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;
 - g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;
 - h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

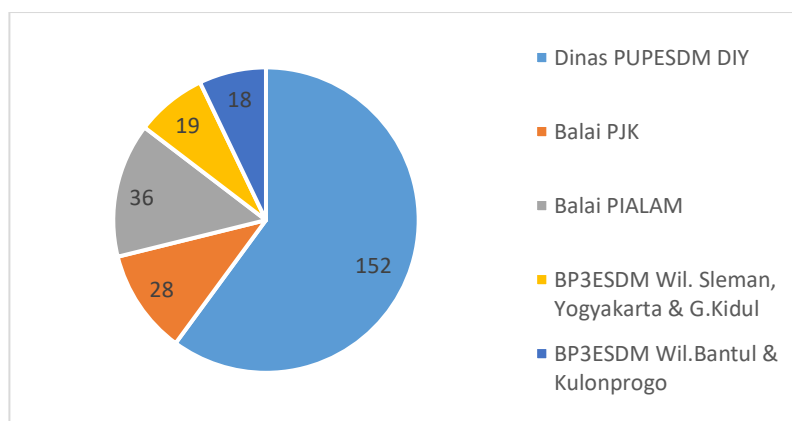
Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Bantul dan Kulonprogo untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, pengusaha air tanah dan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo;
- b. pengoperasian sarana dan prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
- e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;
- f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;
- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

2.2. SUMBER DAYA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DI. Yogyakarta sampai 31 Desember 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah

pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat, Bidang dan Balai) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan-
Energi Sumber Daya Mineral DIY
Per 31 Desember 2021

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan-Energi Sumber
Daya Mineral DIY Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2021

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon IIa	2
	b. Eselon IIIa	8
	c. Eselon IVa	26
2	Jabatan Fungsional Umum	161
3	CPNS	28
4	Jabatan Fungsional Tertentu	28
JUMLAH		253

Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2021

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber
Daya Mineral Pemda DIY Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2021

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya/IVd	-
2	Pembina Utama Muda/IVc	-

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
3	Pembina Tingkat I/IVb	5
4	Pembina/IVa	5
5	Penata Tingkat I/III d	30
6	Penata/III c	18
7	Penata Muda Tingkat I/III b	43
8	Penata Muda/III a	48
9	Pengatur Tingkat I/II d	61
10	Pengatur/II c	19
11	Pengatur Muda Tingkat I/II b	19
12	Pengatur Muda/II a	1
13	Juru Tingkat I/Id	4
14	Juru/Ic	-
15	Juru Muda Tk I/Ib	-
16	Juru Muda/Ia	-
JUMLAH		253

Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2021

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	31
2	Sarjana	93
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	22
5	SLTA /sederajat	97
6	SLTP/sederajat	5
7	SD/sederajat	3
JUMLAH		253

Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2021

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan-Energi Sumber Daya Mineral DIY Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2021

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	182
2	Wanita	71
JUMLAH		253

Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan pengelolaan persampahan regional		780 ton/hari		540 ton/hari	n/a	n/a	n/a	n/a	569 ton/hari	n/a	n/a	n/a	n/a	105,37 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola		n/a		27.400 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	23.821 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	103,57 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat		n/a		92,03%	n/a	n/a	n/a	n/a	95,28%	n/a	n/a	n/a	n/a	103,53 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penanganan titik genangan		n/a		1 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	200,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Ketersediaan air curah yang dikelola		n/a		17000 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	18219 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	107,17 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan Air Minum/Air Curah		n/a		200 liter /detik	n/a	n/a	n/a	n/a	212,3 liter /detik	n/a	n/a	n/a	n/a	106,15 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan air bersih di daerah sulit air		n/a		70 dusun	n/a	n/a	n/a	n/a	75 dusun	n/a	n/a	n/a	n/a	107,14 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rerata penurunan muka air tanah		n/a		< 20	n/a	n/a	n/a	n/a	< 20	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni		n/a		7,62%	n/a	n/a	n/a	n/a	11,78%	n/a	n/a	n/a	n/a	154,59 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan kawasan pengembangan perumahan		n/a		7,19%	n/a	n/a	n/a	n/a	22,22%	n/a	n/a	n/a	n/a	309,04 %	n/a	n/a	n/a	n/a

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penanganan kawasan kumuh		n/a		39,80%	n/a	n/a	n/a	n/a	46,13%	n/a	n/a	n/a	n/a	115,90 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman		n/a		20%	n/a	n/a	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis		n/a		2 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	5 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	250,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Penduduk Berakses Energi		n/a		96,51%	n/a	n/a	n/a	n/a	99,95%	n/a	n/a	n/a	n/a	103,56 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan		n/a		5000 RT	n/a	n/a	n/a	n/a	6577 RT	n/a	n/a	n/a	n/a	131,54 %	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Penambahan Kapasitas Air Baku		n/a		35 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	16,09 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	45,97 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi		n/a		71,80%	n/a	n/a	n/a	n/a	71,90%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,14 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi		n/a		66,48%	n/a	n/a	n/a	n/a	66,50%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,03 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pemenuhan Ketersediaan Air Baku		n/a		40,8 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	41,05 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	100,61 %	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tertib ijin usaha pertambangan		n/a		12 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	12 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tertib ijin perusahaan air tanah		n/a		15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	17 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	113,33 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tertib ijin ketenagalistrikan		n/a		15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral		n/a		8 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	8 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Peningkatan kinerja jasa konstruksi		n/a		62,84%	n/a	n/a	n/a	n/a	63,26%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,67 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian		n/a		800 LHU	n/a	n/a	n/a	n/a	2360 LHU	n/a	n/a	n/a	n/a	295,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap		75,26 %		72,91%	73,46 %	74,06 %	74,66 %	75,26 %	72,92%	73,48 %	71,56 %	70,52		100,01 %	100,03 %	96,62 %	101,15 %	
	Penambahan Jaringan Jalan Baru		100%		33,02%	33,44 %	46,99 %	69,11 %	100 %	33,03%	35,67 %	48,08%	70,34		100,03 %	106,67 %	102,32 %	101,7 %	
10	Penanganan sampah sistem regional		780 ton/hari		n/a	600 ton/hari	660 ton/hari	720 ton/hari	780 ton/hari	n/a	607,65 ton/hari	561,81 ton/hari	699,29		n/a	101,28 %	85,12 %	97,12 %	
	Layanan Sistem air limbah terpusat		27.400 SR		n/a	24.100 SR	25.200 SR	26.300 SR	27.400 SR	n/a	25.018 SR	25.294 SR	26.050		n/a	103,81 %	100,37 %	99,05 %	
	Penanganan Lokasi genangan		1 lokasi		n/a	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	n/a	1 lokasi	0 lokasi	0 lokasi		n/a	100 %	0 %	0 %	
11	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional		1.150 liter/detik 00		n/a	450 liter/detik	750 liter/detik	1.100 liter/detik	1.150 liter/detik	n/a	546 liter/detik	750 liter/detik	750 liter/detik		n/a	121,33 %	100,00 %	68,18 %	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Panjang jaringan distribusi SPAM regional		110.074 meter		n/a	81.648 meter	91.174 meter	92.374 meter	110.074 meter	n/a	91.447 meter	91.447 meter	91.447		n/a	112,00 %	100,30 %	98,9%	
	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air		82 dusun		n/a	73 dusun	76 dusun	79 dusun	82 dusun	n/a	85 dusun	98 dusun	112		n/a	116,44 %	128,95 %	141,77 %	
	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer		< 20 %		n/a	< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %	n/a	< 20 %	< 20 %	< 20 %		n/a	100%	100%	100%	
12	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni		53,78 %		n/a	21,75 %	32,43 %	43,10%	53,78 %	n/a	38,86 %	48,86 %	56,12		n/a	178,66 %	150,66 %	130,20 %	
	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW		20,00 %		n/a	8,00%	12,00 %	16,00%	20,00 %	n/a	8,91 %	32,02 %	45,49%		n/a	111,38 %	266,83 %	284,3 %	
	Cakupan penanganan kawasan kumuh		100,00 %		n/a	58,22 %	72,16 %	86,08 %	100,00 %	n/a	68,94 %	69,11 %	70,06%		n/a	118,41 %	95,77 %	81,38 %	
	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman		48 titik		n/a	48 titik	48 titik	48 titik	48 titik	n/a	269 titik	0 titik	278 titik		n/a	560,42 %	0 %	579,1 %	
	Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi		32 titik		n/a	32 titik	32 titik	32 titik	32 titik	n/a	52 titik	0 titik	0 titik		n/a	162,50 %	0 %	0 %	
13	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik		13.848 RT		n/a	7.848 RT	9.848 RT	11.848 RT	13.848 RT	n/a	8168 RT	10011 RT	11.955		n/a	104,08 %	101,66 %	100,9	
14	Penyediaan Air Baku		19,50 liter/detik		n/a	219,50 liter/detik	19,50 liter/detik	19,50 liter/detik	19,50 liter/detik	n/a	403,86 liter/detik	20 liter/detik	56,56		n/a	183,99 %	102,56 %	290,05 %	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY		77,20 %		n/a	72,30 %	74,50 %	75,85 %	77,20 %	n/a	72,31 %	72,32 %	74,96%		n/a	100,01 %	97,07 %	98,8%	
	Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY		87,00 %		n/a	72,96 %	77,82 %	82,41 %	87,00 %	n/a	73,48 %	73 %	79,11		n/a	100,71 %	93,81 %	95,99 %	
	Pengelolaan Air Baku		84,00 liter/detik		n/a	51,60 liter/detik	62,40 liter/detik	73,20 liter/detik	84,00 liter/detik	n/a	54,31 liter/detik	61,1 liter/detik	566,1		n/a	105,25 %	97,92 %	77,33 %	
15	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar		40 Izin		n/a	19 Izin	26 Izin	33 Izin	40 Izin	n/a	22 Izin	29 Izin	33		n/a	115,79 %	111,54 %	100%	
	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan		75 Izin		n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin	75 Izin	n/a	35 Izin	50 Izin	60 Izin		n/a	116,67 %	111,11 %	100,00 %	
	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan		75 Izin		n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin	75 Izin	n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin		n/a	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi		92 Unit		n/a	62 Unit	72 Unit	82 Unit	92 Unit	n/a	62 Unit	62 Unit	62 Unit		n/a	100,00 %	86,11 %	75,6%	
	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		7,80 %		n/a	7,50 %	7,60 %	7,70 %	7,80 %	n/a	7,59 %	7,686 %	7,78 %		n/a	101,20 %	101,13 %	101,03 %	
16	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi		99,14 %		n/a	64,12 %	75,13 %	86,15 %	99,14 %	n/a	64,12 %	71,03 %	86,98		n/a	100%	94,54 %	100,9 %	
	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan		800 LHU		n/a	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	n/a	1286 LHU	765 LHU	1.045 LHU		n/a	160,75 %	95,63 %	130,6 %	
17	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100%	100%	
	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100%	100%	

Berdasarkan realisasi capaian akhir tahun 2021 tabel diatas, capaian yang tertinggi pada indikator Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman dengan persentase rasio capaian sebesar 579,1%. Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya diajabarkan dalam sub bab pembahasan berikut.

2.3.1. Sasaran Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah provinsi salah satunya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Penyelenggaraan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). SPALD dalam pelayanannya terbagi menjadi 2 (dua) SPALD-Setempat (SPALD-S) dan SPALD-Terpusat (SPALD-T), SPALD-Setempat terdiri atas Sub-Sistem pengolahan Setempat; Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-Sistem pengolahan Lumpur Tinja. Cakupan pelayanan SPALD-Terpusat komponennya terdiri atas Sub-Sistem Pelayanan, Sub-Sistem Pengumpulan dan Sub-sistem pengolahan Terpusat. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Sasaran Pengelolaan air limbah domestik untuk mempertahankan kualitas sesuai ketentuan baku mutu lingkungan. Air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan/badan sungai harus dioleh di unit pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sampel air diambil dari inlet dan outlet IPAL yang menggunakan metode biologis. Sampel inlet diambil dari bak ekuilisasi dan sampel outlet diambil dari hasil akhir IPAL. Ada 7 (tujuh) parameter uji air limbah sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 68 tahun 2016

yaitu pH, BOD, COD, ammonia, minyak dan lemak, total padatan tersuspensi, dan total coliform, dan ada 9 (sembilan) parameter uji air limbah untuk kegiatan IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal yaitu BOD, COD, TDS, TSS, minyak dan lemak, detergen, Suhu, pH dan coliform. Unit IPAL Sewon yang dimiliki oleh Pemda DIY, menggunakan metode biologis sehingga parameter paling mudah untuk mengetahui apakah air hasil pengolahan air limbah sudah aman untuk dibuang ke badan sungai yaitu BOD. Pengelolaan air limbah domestik untuk mempertahankan kualitas sesuai ketentuan Baku Mutu Lingkungan mempunyai indikator parameter BOD dalam effluent hasil pengolahan air limbah domestik.

BOD (Biochemical Oxygen Demand) merupakan karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme/bakteri untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologis. Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, melainkan hanya mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mendekomposisi bahan organik tersebut.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, bahwa baku mutu Air Limbah untuk Kegiatan IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal untuk parameter BOD kadar Paling banyak yaitu 75 mg/L.

Tabel 2. 6 Hasil Uji Air Limbah di Outlet IPAL

No	Bulan	BOD (mg/L)
1	Januari	7,60
2	Februari	10,50
3	Maret	6,00
4	April	9,50
5	Mei	8,80
6	Juni	9,00
7	Juli	15,80
8	Agustus	11,40
9	September	9,10
10	Oktober	7,20
11	November	9,40
12	Desember	9,60

Sumber : Dinas PUPESDM, 2021

Kapasitas terpasang pengolahan air limbah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 75.000 SR. Untuk sementara sampai di akhir tahun 2022, direncanakan sebesar 26.300 SR sehingga diharapkan pada perencanaan penyambungan dari masing-masing kabupaten/kota ada penambahan kurang lebih 500 SR.

Pada akhir tahun 2022 rumah tangga yang sudah berakses dengan pelayanan jaringan air limbah regional (SPALD-Terpusat) sebesar 26.050 Sambungan Rumah (SR). Sehingga prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman 79,43% akses layak (termasuk 11% aman). Selain melalui program APBD Provinsi, peningkatan pelayanan rumah tangga berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan APBD Kabupaten dan APBN, yaitu

a. Sistem Pengolahan Air Limbah

1. Program optimalisasi Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dari masing-masing kabupaten/kota.
2. Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat sistem jaringan perpipaan SPALD-Terpusat Sewon Kab. Bantul, berupa peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 25.000 SR bertambah menjadi 75.000 SR
3. Pembangunan Sanimas Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulonprogo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah
4. Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian rumah tangga berakses sanitasi telah mencapai 96,18 % dari target capaian sebesar 94,25% di tahun 2022.

Tabel 2. 7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	96,46 %	93,36 %	96,18	103,02	94,25 %	102,05

Tabel 2. 8 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	TANPA AKSES	AKSES BELUM LAYAK	AKSES DASAR	AKSES LAYAK TIDAK TERMASUK AMAN				AKSES AMAN		
		BABS	Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak	Cubluk (Perdesaan)	INDIVIDUAL	BERSAMA			Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Aman	SPALD-T	
					Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak	FASILITAS UMUM (MCK Komunal)	Jamban Bersama Layak	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)			
1	YOGYAKARTA	0	4.572	0	255.905	3.405	16.977	2.331	75.002	77.745	
		0,00%	1,05%	0,00%	58,70%	0,78%	3,89%	0,53%	17,20%	17,83%	
2	BANTUL	0	111.363	23.600	628.620	0	21.783	0	191.253	53.377	
		0,00%	10,81%	2,29%	61,03%	0,00%	2,11%	0,00%	18,57%	5,18%	
3	KULONPROGO	0	8.862	39.131	316.472	0	26.424	691	32.695	10.209	
		0,00%	2,04%	9,01%	72,84%	0,00%	6,08%	0,16%	7,53%	2,35%	
4	GUNUNGKIDUL	0	15.552	71.278	538.513	0	70.671	0	29.852	23.408	
		0,00%	2,08%	9,51%	71,87%	0,00%	9,43%	0,00%	3,98%	3,12%	
5	SLEMAN	0	13.153	11.439	878.666	358	60.593	0	213.448	54.941	
		0,00%	1,07%	0,93%	71,29%	0,03%	4,92%	0,00%	17,32%	4,46%	
	JUMLAH	0	148.428	148.438	2.629.503	3.497	197.766	2.955	538.434	213.267	
		0,00%	3,82%	3,82%	67,73%	0,09%	5,09%	0,08%	13,87%	5,49%	
	AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2021	0	148.428	148.438	2.833.721				751.701		
		0,00%	3,82%	3,82%	72,99%				19,36%		
		3,82%		96,18%							

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Penanganan air limbah terpusat**

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Penambahan jumlah sambungan rumah air limbah Sistem IPAL Terpusat Sewon untuk tahun 2020 dibatasi karena kapasitas IPAL yang sudah melebihi kapasitas rencana. Pada tahun ini dengan kontrak tahun jamak, APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPAL Regional Sewon untuk menambah kapasitas IPAL Sewon. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2020 adalah 25.294 SR dan pada tahun 2021 terbangun sambungan rumah sebanyak 756 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2020	2021	s.d 2021
1	Kota Yogyakarta	18.566	531	19.097
2	Kabupaten Bantul	2.899	225	3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	-	3.829
Jumlah Total		25.294	756	26.050

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2021

Selain peningkatan kapasitas IPAL Regional Sewon yang dilaksanakan oleh APBN sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akses sanitasi aman di DIY, APBN melalui BPPW DIY ditahun 2021 juga melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan SPALDT Depok Sleman
- Pembangunan SPALDT Bambanglipuro Bantul

Tabel 2. 10. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	25.839	75.000	33,85%--> 34,45

Pengelolaan air limbah yang dimaksud yaitu:

- Sleman = 3.829 SR = 19.145 jiwa
- Bantul = 2.899 SR = 14.495 jiwa
- Kota Yogyakarta = 18.566 SR = 92.830 jiwa

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Program Sanimas merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2020, BPPW melaksanakan Program Sanimas di untuk 10 lokasi di DIY, 4 lokasi di Sleman, 5 lokasi di Bantul, dan 1 lokasi di Gunung Kidul. Selain Program Sanimas ada Program DAK Sanitasi yang juga salah satu program untuk peningkatan akses sanitasi yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2020, ada 24 lokasi yang melaksanakan program DAK Sanitasi dengan 12 lokasi pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal dan 12 lokasi pelaksanaan pembangunan tangka septik individual. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2021 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	147
4	Kabupaten Gunungkidul	72
5	Kabupaten Kulon Progo	39
Jumlah Total		461

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

- **Sampah**

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas Pekerjaan Uumu Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melakukan kegiatan berupa:

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
2. Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
3. Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
4. Pekerjaan tanggul penahan dinding, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 450 Meter

Selain itu, APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2021 akan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunung Kidul dan Pakem Sleman.

Tabel 2. 12. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	PENANG ANAN (DIANGK UT KE TPA)	PENGUR ANGAN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	SAMPAH TERKELO LA	SAMPAH BELUM TERKELO LA
1	YOGYAKARTA	Ton/Hari	362,09	256,73	102,34	359,07	3,02
		%		70,50%	28,10%	98,61%	0,83%
2	BANTUL	Ton/Hari	227,36	64,86	102,42	167,28	60,08
		%		28,53%	45,05%	73,58%	26,42%
3	KULONPROGO	Ton/Hari	94,53	43,18	8,93	52,11	42,42
		%		45,68%	9,44%	55,12%	44,88%
4	GUNUNGKIDUL	Ton/Hari	80,09	47,47	22,15	69,62	10,47
		%		59,27%	27,65%	86,93%	13,07%
5	SLEMAN	Ton/Hari	369,87	205,09	40,37	245,45	124,42
		%		55,45%	10,91%	66,36%	33,64%
	JUMLAH	Ton/Hari	1.133,94	617,33	276,20	893,53	240,41
		%		54,44%	24,36%	78,80%	21,20%

Sumber : Data Pokja PKP, 2021

Terdapat 3 (tiga) unit TPA di DIY yaitu 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul) dan, 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo). Volume total layanan 3 unit TPA tersebut kurang lebih 772,73 ton/hari.

Tabel 2. 13. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	1	268,38
2	Kabupaten Bantul		136,10
3	Kabupaten Sleman		277,44
4	Kabupaten Gunungkidul	1	47,61
5	Kabupaten Kulon Progo	1	43,20
Jumlah Total		3	772,73

Sumber : Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

- **Drainase**

Munculnya genangan air menandakan adanya permasalahan saluran air atau drainase disuatu wilayah, sistem induk drainase perkotaan terkoneksi dengan drainase primer. Kewenangan Kota/Kabupaten, ada

pula kewenangan pemeliharaan oleh pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Banyaknya genangan air saat turun hujan di sejumlah jalan yang ada di wilayah DIY disebabkan beberapa hal. Pertama kebiasaan masyarakat membuang limbah rumah tangga disalurkan drainase berpotensi munculnya sumbatan pada drainase, yang akibatnya air meluap ke badan jalan. Persoalan kedua jalan yang tidak dilengkapi drainase, dan hanya ada saluran irigasi bahkan double fungsi irigasi dan drainase.

Dari lima kabupaten/kota yang ada di DIY, baru Kota Yogyakarta saja yang sudah memiliki rencana induk sistem drainase. Rencana induk sistem drainase perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang Kota.

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Penyusunan FS dan DED Drainase Kawasan Kulur dan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

2.3.2 Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/kota

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Pada akhir tahun 2022 jumlah rumah tangga penerima layanan air minum curah lintas kabupaten/kota sebanyak 15.669 Rumah Tangga. Sehingga prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,93%. Selain melalui program APBD Provinsi, peningkatan pelayanan rumah tangga penerima layanan air minum layak juga didukung melalui kegiatan APBD Kabupaten dan APBN.

Ketersediaanya harus dijamin segi kuantitas, kualitas dan keberlanjutannya. Sasaran Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Curah sesuai Ketentuan Baku mutu Lingkungan bertujuan untuk mengawasi dan memantau air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat dipastikan memenuhi baku mutu air bersih, sehingga aman dapat dikonsumsi oleh konsumen. Parameter utama yang paling mudah untuk menganalisa kualitas air minum di lapangan yaitu parameter sisa klor. Kadar sisa klor bebas di dalam air minum yang diizinkan berkisar antara 0,2 – 0,6 mg/L, dimana sudah bisa sangat efektif dalam membunuh bakteri patogen dan virus lainnya selama pendistribusian air minum kepada masyarakat, dengan jangka waktu kontak 5 – 10 menit. Kadar sisa klor menyebar di jaringan distribusi air minum dan menurun seiring semakin jauhnya jarak distribusi dari resevoir. Desinfektan yang umum digunakan adalah senyawa yang mengandung klor karena stabil dan ekonomis.

Kadar sisa klor yang melebihi batas tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Tabel 2. 14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	92,82 %	92,30 %	92,9 %	100,6 5%	94,14 %	98,68%

Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 15 Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2021

No	Kabupaten	Perpipaan	Non perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	422.876	743.909	65.813
2	Bantul	227.077	795.531	7.390
3	Yogyakarta	204.649	231.287	-
4	Gunung Kidul	347.510	224.442	177.321
5	Kulon Progo	207.342	221.797	5.344
Jumlah		1.394.587	2.212.989	274.717
Total Akses Air Minum		3.607.576		
Capaian Akses		92,92%		

Sebagai penunjang penyediaan air minum melalui APBN, APBD Provinsi & APBD Kabupaten dilakukan melalui:

1. Pembangunan IPA SPAM Regional Kartamantul kapasitas 300 liter/detik (Sistem Kebon agung) dan jaringan perpipaan distribusi utama dengan rencana jumlah penduduk yang akan dilayani program ini berjumlah 350.000 jiwa, dan sampai dengan tahun 2022 telah terlayani 15.668 rumah tangga.
2. Penguatan lembaga BUMD penyelenggara penyediaan air minum curah regional (PDAB Tirtatama) melalui penambahan subsidi Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kab/Kota pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Optimalisasi pemanfaatan pelayanan SPAM Regional Kartamantul
4. Pembangunan sistem SPAM Kamijoro dan Banyusoco

2.3.3. Meningkatkan luas fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air

irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 DI. kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar. Tolok ukur meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi berdasarkan indikator peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dihitung luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi dibagi luas areal daerah irigasi dalam satuan persen.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi, Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2021 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 11.992,45 hektar atau 85,50% dari luas areal daerah irigasi DIY. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,28% dari target sebesar 85,50%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 98,38%.

Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Jaringan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.
- b. Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

Tabel 2. 16. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2020/2021				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021
		(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)	(%)
1	Tirtorejo	541,00	330,00	132,33	4,67	467,00	467,00	86,32
2	Semoyo	30,00	14,00	12,33	0,00	26,33	26,33	87,78
3	Kucir	61,00	32,00	16,00	4,57	52,57	52,57	86,17
4	Kuton	113,00	67,33	28,33	1,47	97,13	97,13	85,96
5	Madugondo	104,00	48,00	21,67	19,67	89,33	89,33	85,90
6	Dadapan	38,00	22,00	7,44	3,57	33,01	33,01	86,87
7	Pulodadi	176,00	135,67	1,33	14,00	151,00	151,00	85,80
8	Glendongan	209,00	170,00	0,00	11,00	181,00	181,00	86,60
9	Klampok	295,00	247,00	0,00	7,00	254,00	254,00	86,10
10	Sekarsuli	145,00	116,00	0,33	7,90	124,23	124,23	85,68
11	Nologaten	27,00	23,33	0,00	0,00	23,33	23,33	86,42
12	Ngebruk	41,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	87,80
13	Trini	152,00	120,00	0,00	11,00	131,00	131,00	86,18
14	Cokrobedog	194,00	152,00	12,00	4,33	168,33	168,33	86,77
15	Gamping	532,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	86,47
16	Brongkol	16,00	13,00	0,00	1,13	14,13	14,13	88,33
17	Tumut	44,00	32,67	3,00	3,00	38,67	38,67	87,88
18	Timoho	121,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	88,43
19	Engkuk-engkukan	14,00	10,17	0,00	2,00	12,17	12,17	86,90
20	Sambeng	60,00	48,33	0,00	4,00	52,33	52,33	87,22
21	Mojo	48,00	40,00	0,00	2,00	42,00	42,00	87,50
22	Sembuh	33,00	27,67	0,00	1,33	29,00	29,00	87,88
23	Ponggok	132,00	103,00	6,00	6,00	115,00	115,00	87,12
24	Kanoman	16,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	87,50
25	Tanjung	776,00	620,00	0,00	50,00	670,00	670,00	86,34
26	Bangeran	138,00	115,00	3,00	4,00	122,00	122,00	88,41
27	Mrican	162,00	90,67	39,67	10,67	141,00	141,00	87,04
28	Sidomulyo	160,00	137,00	0,00	2,00	139,00	139,00	86,88
29	Prangkok	81,00	53,00	3,00	14,33	70,33	70,33	86,83
30	Sidoraharjo	98,00	77,00	5,00	3,00	85,00	85,00	86,73
31	Madean	328,00	207,67	64,67	10,67	283,00	283,00	86,28
32	Pogung	1,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	87,00
33	Minggiran	4,00	1,43	2,00	0,00	3,43	3,43	85,83

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2020/2021				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021
		(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)	(%)
34	Mendungan	4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	87,50
35	Mergangsan	15,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	86,67
36	Blawong	1.077,00	700,00	167,67	63,33	931,00	931,00	86,44
37	Pendowo	1.251,00	759,67	281,00	41,67	1.082,33	1.082,33	86,52
38	Pijenan	2.563,00	1.748,33	416,74	59,67	2.224,74	2.224,74	86,80
39	Simo	1.247,00	791,67	248,33	7,00	1.047,00	1.047,00	83,96
40	Payaman	1.040,00	73,33	318,67	420,00	812,00	812,00	78,08
41	Sapon	1.900,00	1.066,67	546,00	33,00	1.645,67	1.645,67	86,61
		13.987,00	8.827	2.337	829	11.992	11.992,45	85,74

Tabel 2. 17. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	84,85%	85,50%	85,74%	100,28%	86,25 %	99,41%

2.3.4 Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya aksesibilitas wilayah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan aksesibilitas wilayah. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan nasional dan provinsi yang tersedia dengan kebutuhan panjang jalan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY dalam satuan persen.

Sampai dengan tahun 2021 panjang jalan yang telah terbangun sepanjang 984.93 KM atau 98.87% dari kebutuhan panjang jalan yang direncanakan untuk menghubungkan pusat produksi sepanjang 996,16 Km (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 247,91 Km, Jalan Provinsi sepanjang 710,40 KM, JJLS 83.37, dan jalan Prambanan – Gading yang terbangun sepanjang 9.27 Km, Aksesibilitas sebesar 98.87 % telah melampaui target RPMJD 2017 – 2022 sebesar 98.22%.

Tabel 2.18 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	98.03	98,22 %	98.87 %	100.66 %	100 %	98.87%

Aksesibilitas wilayah di provinsi dicapai oleh Program Penyelenggaraan Jalan, serta dukungan dari Dana Keistimewaan dan APBN Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPPR. Pengembangan aksesibilitas wilayah di DIY baru difokuskan pada percepatan penyelesaian jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN), serta pengembangan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan jalan Prambanan-Gading.

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2021 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 536.295 km atau 70.523%. Kondisi jalan mantap tersebut mengalami penurunan dari kemantapan jalan di tahun sebelumnya akibat adanya refocusing pada program peningkatan jalan serta rehabilitasi yang

terjadi pada T.A 2020 – 2021. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.12

Tabel 2. 19. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	536.295	70.523	Baik	341.840	44.952
				Sedang	194.455	25.571
2	Tidak Mantap	224.155	29,477	Rusak Ringan	156.935	20.637
				Rusak Berat	67.220	8,840
JUMLAH		760,45	100,00	Jumlah	760,45	100,00

Sumber: Dinas PUPESDM, 2021

2.3.5 Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam Permendagri No 50 Tahun 2021 kewenangan Pemerintah Daerah pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi,
2. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi, dan
3. kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pemda DIY menyelenggarakan layanan pembinaan jasa konstruksi melalui layanan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data,

hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat. Pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;
3. Pembinaan masyarakat jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan bagi para tenaga kerja konstruksi.

Kinerja pembinaan jasa konstruksi diukur menggunakan indikator sasaran Peningkatan Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi melalui empat meta indikator yaitu:

- a. Sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot sebesar 50%.
- b. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi dengan bobot sebesar 25%.
- c. Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi dengan bobot sebesar 12,5%.

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir dengan bobot sebesar 12,5%.

Tabel 2. 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	75,13 %	85,86 %	98,82%	115,09 %	99,57 %	99,25 %

Tabel 2. 191. Capaian Indikator Kinerja

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2020	Capaian pd th 2021 sj (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2021	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021					
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	99,14%	86,15%		71,03%		82,98%	<i>(Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Prosentase Lay Si JasKon th berjalan x 50%)</i>
1 . <u>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat</u>	2.406 Org	2.106 Org	50,00%	1.533 Org	92 Org	1.625 Org	<i>Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target sd th 2022</i>
2 . <u>Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi</u>	100,00%	84,77%	50,00%	78,03%		98,42%	<i>(Jmlh capaian org terlayani mell sistem informasi jasa konstruksi th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Persentase layanan SIPJAKI x 50%)</i>
a. Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	440.750 Org	422.480 Org	50,00%	444.268 Org		501.715 Org	
1) <i>Layanan Klinik Konstruksi secara tatap muka dan melalui website</i>	439.400 Org	421.400 Org		443.235 Org	57.447 Org	500.682 Org	
2) <i>Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pembinaan Jasa Konstruksi</i>	900 Org	720 Org		710 Org	0 Org	710 Org	
3) <i>Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi</i>	450 Org	360 Org		323 Org	0 Org	323 Org	
b. Persentase layanan SIPJAKI	100,00%	70,00%	50,00%	70,00%		83,00%	

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

2.3.6 Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

Program Pengembangan Perumahan merupakan salah satu program untuk mendukung sasaran perangkat daerah dalam sektor perumahan yaitu penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Pada tahun 2020, presentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak mencapai 97,26. Penanganan Rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sejumlah 4.758 unit yang pelaksanaannya melalui Anggaran DAK sejumlah 556 unit, BSPS sejumlah 1.991 unit, Kab/Kota sejumlah 1.063 unit dan DIY sejumlah 1.090 unit. Melalui program tersebut mampu meningkatkan presentase rumah tangga dengan hunian yang layak menjadi 97,75%. Penanganan Rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2021 sejumlah 36.801 unit dari baseline RTLH 65.578.

Tabel 2. 22. Target dan Realisasi
Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	97,26%	96,83 %	97,75	100,95%	97,50 %	100,26 %

Penanganan rumah tidak layak huni ditahun 2021 dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik melalui anggaran APBN, APBD Kab/Kota, APBD DIY dan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan akumulasi penanganan sejumlah 4.758 unit sebagai berikut:

Tabel 2. 20. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

LOKASI	DATAB ASE KAB	TER TANGA NI TH 2017	TER TANGA NI TH 2018	TER TANGA NI TH 2019	TER TANGA NI TH 2020	PENANGANAN RTLH 2020					SDH TER TANGA NI TH 2021
						DA K	BSPS	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	345	132	449	30	10	34	655
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	1.093	150	67	52	26	132	427
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	1.722	127	925	0	0	363	1.415
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	1.536	147	273	390	22	89	921
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	1.861	0	277	591	0	472	1.340
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	10.555	6.557	556	1.991	1.063	58	1.090	4.758

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2021

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota dan diperbaharui kembali berdasarkan SK yang telah ditetapkan Kabupaten/kota (tabel 2.23) dimana Total kawasan kumuh DIY yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah seluas 420,3 Ha. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Tabel 2. 214 SK Penangan Kumuh Provinsi D.I. Yogyakarta 2021

Lokasi			Luas	Sumber
Kabupaten	Kecamatan	Lokasi		
Bantul	Banguntapan	wiyoro	2	SK Bupati Bantul No. 82 Tahun 2021
		Pamotan	10,92	
		singosaren 3	7,3	
		grojogan	1,89	
		dladan	2,09	
		Kragilan	5,64	
		Nglaren	1,3	

Kabupaten	Lokasi		Luas	Sumber
	Kecamatan	Lokasi		
		salakan	10,29	
		sampang	3,01	
	Bantul	bantul warung	5,2	
		badegan	1,42	
		geblag	5,59	
		serayu	0,88	
		soropaten	0,78	
		Gemahan	7,72	
		Deresan	5,78	
		Bogoran	12,64	
		Cepoko	9,24	
		Priyan	4,65	
		Kweden	3,08	
		Taskombang	2,26	
		Dagaran	5,64	
		Serut	0,88	
		Bolon	2,18	
		Neco	1,61	
		Keyongan	3,99	
		Kasihan	Jogonalan Lor	
	Jogonalan Kidul		3,14	
	Kembaran		1,34	
	Jetis		3,91	
	Brajan		7,06	
	Kasihan		4,65	
	Ngewotan/Janten		4,36	
	Sewon	Sawah	2,38	
		Kaliputih	1,41	
		banyon	6,49	
		semail	8,18	
		randubelang	2,21	
		ngireng Ireng	1,31	
		Geneng	2,94	
Jaranan		12,44		
Pelemsewu		1,75		
Glugo		6,25		
Glondong		2,09		
Cabean		0,33		
Pandes		2,24		
Ngentak	9,72			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Kabupaten	Lokasi		Luas	Sumber
	Kecamatan	Lokasi		
	Sedayu	Sungapan Dukuh	2,76	
		Bakal Dukuh	3,67	
		Sukoharjo	6,22	
		Pereng Wetan	1,97	
		Ngentak	4,89	
		Jaten	4,14	
		Plawonan	1,73	
		Watu	2,18	
	Piyungan	Ngablak	6,27	
		Wanujaya Kidul	6,83	
		Sandeyan	8,48	
	Pajangan	dukuh	10,53	
		benyo	13,52	
ngincep		7,1		
	Jumlah		283,49	
Kulonprogo	Sentolo	Banguncipto	1,81	416 Tahun 2020 Tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024
		Sentolo	11,3	
	Galur	Brosot	4,56	
	Jumlah		17,67	
Sleman		Trini	9,15	9.3/Kep.KDH/A/2020 Tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sleman
		Tiyasan	7,32	
		Pondok	2,96	
		Sanggrahan	4,99	
		Kaliwaru	0,84	
		Soropadan	1,42	
		Gandok	1,57	
		Dero	2,41	
		Jongkang	14,22	
		Jetis	2,93	
		Rogoyudan	2,13	
		Mranggen Tegal	5,87	
		Mranggen Kidul	1,38	
		Karanganyar	1,16	
	Karangjati	2,07		
	Jumlah		60,42	
Kota Yogyakarta	Kota gede	Prenggan	12,29	158 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
		Purbayan		
		Rejowinangun		
	Mergangsan	Brontokusuman	8,36	
		Keparakan		

Lokasi			Luas	Sumber	
Kabupaten	Kecamatan	Lokasi			
		Wirogunan			
		Ngampilan	1,46		
		Gondomanan	0,75		
		Wirobrajan	Pakuncen		13,75
			Patangpuluhan		
			wirobrajan		
		Jetis	Bumijo		4,36
			Cokrodiningrat		
		Danurejan	Suryatmajan		2,3
			Tegal Panggung		
		Gedongtengen	Pringgokusuman		4,81
			Sosromenduran		
		Gondokusuman	Baciro		10,64
			Klitren		
	Terban				
	Jumlah		58,72		
	Total Kumulatif		420,3		

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas PSU sesuai dengan Permen PUPR 14-2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas

Selain penanganan rumah tidak layak huni, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bidang perumahan yaitu kegiatan pengembangan perumahan dengan indikator Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW dan kegiatan penanganan kawasan kumuh dengan indikator Cakupan penanganan kawasan kumuh. Dalam pelaksanaan indikator-indikator tersebut ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau sebagai faktor pendorong dan beberapa faktor penghambat.

Tabel 2. 25. Penyebab keberhasilan/Kegagalan

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan RTLH dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan CSR serta adanya swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.	Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan calon penerima bantuan hanya melalui zoom sehingga ada informasi yang tidak bisa tersampaikan serta keterbasan calon penerima bantuan untuk bisa menggunakan aplikasi zoom.	Sosialisasi akan ditindaklanjuti oleh konsultan perencanaan dengan metode yang berbeda yaitu penyampaian informasi secara langsung pada penerima bantuan serta untuk menghindari pengumpulan massa
2.	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	1. Kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota 2. Pelaksanaan perumahan subsidi masih menjadi prioritas pemerintah pusat meskipun anggaran APBN sebagai salah satu stimulan ke pada MBR	Dampak pandemi Covid menyebabkan menurunnya jumlah angka pembelian perumahan bersubsidi	Mendorong pembangunan perumahan dari berbagai sektor pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran melalui CSR
3.	Cakupan penanganan kawasan kumuh	Adanya SK kabupaten / Kota yang bisa mensinkronkan lokasi dan jenis kegiatan pada penanganan kawasan kumuh	1. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang memiliki nama dan indikator berbeda yang menyulitkan penghitungan capaian. 2. Penanganan oleh Pusat yang memprioritaskan kws kumuh perkotaan sehingga kws kumuh perkotaan yang menjadi kewenangan pusat terabaikan	1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kabupaten / kota untuk menghitung capaian penanganan kws kumuh 2. Mendorong penanganan kawasan kumuh di perdesaan melalui program reguler non penanganan kawasan kumuh dan CSR.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 26 Kinerja Program

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	48,86 %	43,1 %	56,12%	130,21 %	53,78 %	104,35%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	32,02 %	16 %	45,49%	284,31 %	20 %	227,45%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penanganan kawasan kumuh	69,11 %	86,08 %	70,06%	81,39%	100 %	70,06%

2.3.7 Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

Energi listrik merupakan salah satu elemen kebutuhan dasar bagi masyarakat modern saat ini. Pemerataan aksesibilitas listrik bagi masyarakat memberikan pengaruh besar dalam percepatan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan ketenagalistrikan yang terarah merupakan hal yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah.

Sampai dengan akhir 2020 terdapat 10.011 rumah tangga miskin berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dari total 61.999 rumah tangga miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (DTKS) 2015. Kemudian di tahun 2021 terdapat penambahan sejumlah 1944 rumah tangga sehingga terdapat 11.955 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Sedangkan capaian Rasio Elektrifikasi DIY berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 99,99 %. Apabila dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD 2017-2022, capaian Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik telah mencapai 99,99 % dari target RPJMD sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan program sub urusan ketenagalistrikan selanjutnya, pada periode tahun 2023-2026 tetap berorientasi pada pelayanan penerbitan rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan. Sedangkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan rasio elektrifikasi, pelaksanaan program masih berfokus pada penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan, dalam hal ini berupa pemasangan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin baik yang masih menyalur maupun yang belum berlistrik, sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Guna mendukung pelaksanaan fokus sasaran tersebut diatas, diperlukan pula updating dan evaluasi data rumah tangga belum berlistrik serta penyediaan data rumah tangga yang berkelompok dalam suatu area (gerumbul) dan membutuhkan jaringan listrik agar dapat menikmati listrik sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Tabel 2. 22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	99,70%	99,99%	100,29%	100 %	99,99

Disamping permasalahan rasio elektrifikasi, jika dilihat lebih luas tentang kondisi umum energinya saat ini, DIY adalah merupakan provinsi pengimpor energi karena tidak memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan suplai energi dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi finalnya (Listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas). Potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY juga relatif terbatas. Oleh karenanya dalam hal perumusan kebijakan strategi pengelolaan energinya, DIY perlu memberikan penekanan lebih pada

kebijakan konservasi energi dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT yang ada.

Merujuk pada keterangan diatas, bila ditinjau dari parameter Bauran Energi, persentase porsi pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi DIY masih kecil. Penggunaan Bahan Bakar Nabari (BBN) sebagai campuran Biosolar merupakan penyumbang terbesar dari persentase porsi EBT dalam Bauran Energi DIY. Hal ini disebabkan pengembangan pembangkit EBT di DIY yang masih sangat kecil dan belum mengoptimalkan potensi EBT di DIY seluruhnya. Berkaitan dengan tersebut rencana pelaksanaan program kegiatan periode 2023-2026 difokuskan pada upaya penetapan kebijakan dan strategi mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan serta menggiatkan upaya konservasi energi

Melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan BP3ESDM melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan (EBT) di DIY dalam rangka memantau fungsi pembangkit EBT untuk mendukung konservasi energi. Tahun 2023, pembangkit yang diawasi sejumlah 289 pembangkit (1 Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Pantai Baru, 2 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Minggir, Kabupaten Sleman dan 1 PLTMH di Dusun Blumbang, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, serta 285 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di DIY). Dalam rangka menjaga fungsi EBT, BP3ESDM melaksanakan pengoperasian EBT yang dilaksanakan oleh operator dan pemeliharaan rutin.

Pada program pengelolaan ketenagalistrikan, BP3ESDM melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan terhadap seluruh izin yang telah terbit dan inventarisasi pengguna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang belum berizin. Pada tahun 2023 izin usaha ketenagalistrikan yang diawasi sejumlah 220 izin yang terdiri dari Izin Operasi (IO), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Registrasi (SKR), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), dan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (LUPTLS).

Metode pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemegang izin dilaksanakan secara langsung/*onsite* serta penilaian melalui aplikasi SIPGELIS. Penilaian terhadap pemegang izin usaha ketenagalistrikan berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam dokumen perizinan

2.3.8 Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang didapat dari hasil pelaksanaan program pengelolaan mineral dan batu bara dan program pengelolaan aspek kegelogian.

Pengelolaan mineral dan batu bara dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan wilayah usaha pertambangan, pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertambangan, dan pembinaan pengawasan terhadap perizinan usaha pertambangan di DIY.

Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Pemerintah daerah provinsi menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada wilayah izin usaha pertambangan (UU No 3 Tahun 2020).

Untuk mewujudkan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik maka diperlukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada izin usaha pertambangan, melalui pengawasan rutin, pengawasan insidental, koordinasi dengan *stakeholder* terkait, sosialisasi/workshop, evaluasi pada lahan kegiatan pertambangan, serta pendataan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan dalam rangka konservasi air tanah dilaksanakan melalui pengawasan rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan izin pengusahaan

air tanah, koordinasi dengan stakeholder terkait, sosialisasi/workshop, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah, serta pendataan kegiatan perusahaan air tanah tanpa izin.

Perizinan perusahaan air tanah yang telah diterbitkan oleh DPPM DIY berupa Surat Izin Pengeboran Air Tanah, Surat Izin Perusahaan Air Tanah, Surat Izin Pemakaian Air Tanah, dan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan akan dikenakan berupa pemberian sanksi administratif.

Tolok ukur Kesesuaian Izin Perusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dari jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan ditambah jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik dibagi total jumlah izin dikalikan 100%.

BP3ESDM melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh izin yang telah terbit. Pada tahun 2023 izin usaha pertambangan yang diawasi sejumlah 120 izin (46 IUP OP, 74 IPR) dan izin perusahaan air tanah sejumlah 205 izin.

Metode pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemegang izin dilaksanakan secara langsung/*onsite* serta penilaian melalui aplikasi SIPBANG dan SIPATA. Penilaian terhadap pemegang izin air tanah berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam dokumen perizinan, sedangkan penilaian terhadap pemegang izin usaha pertambangan dilakukan berdasarkan kaidah pertambangan yang baik.

Tabel 2. 28. Target dan Realisasi Kinerja Izin Air Tanah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	79 izin	93 izin	93 izin	100 %	115 izin	80,87%

Selain pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemegang izin, BP3ESDM juga melaksanakan inventarisasi dan pendataan pengguna air tanah maupun usaha pertambangan yang belum berizin, pendataan dan pencatatan volume air tanah dan volume produksi pertambangan. Pendataan dan pencatatan volume air tanah dilaksanakan selain sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) juga untuk mendukung konservasi air tanah dan lingkungan sesuai Perda DIY No 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah.

2.3.9 Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam mengemban tanggung jawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang.

Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan. Ketiga program itu bersifat wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 2.29. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Energi Sumber Daya Manusia DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan SKPD	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
			Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
			Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100

Tabel 2. 30. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Kinerja Tahun 2017 – 2022

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	56,399,55 5,062	n/a	n/a	n/a	n/a	51,240,09 1,809	n/a	n/a	n/a	n/a	90.85	n/a	n/a	n/a	n/a		
2	Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, Dan Air Limbah Regional	20,305,10 4,000	n/a	n/a	n/a	n/a	18,988,27 8,545	n/a	n/a	n/a	n/a	93.51	n/a	n/a	n/a	n/a		
3	Program Pengembangan Perumahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	84,478,24 6,975	n/a	n/a	n/a	n/a	75,672,75 5,676	n/a	n/a	n/a	n/a	89.58	n/a	n/a	n/a	n/a		
4	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	79,451,33 2,325	n/a	n/a	n/a	n/a	68,881,25 5,439	n/a	n/a	n/a	n/a	86.70	n/a	n/a	n/a	n/a		
5	Program Pengaturan Dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi Dan Pertambangan	28,449,83 0,145	n/a	n/a	n/a	n/a	23,698,87 4,818	n/a	n/a	n/a	n/a	83.30	n/a	n/a	n/a	n/a		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Pengawasan Dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah Dan Pertambangan	3,476,694,795	n/a	n/a	n/a	n/a	2,780,127,232	n/a	n/a	n/a	n/a	79.96	n/a	n/a	n/a	n/a		
7	Program Penyelenggaraan Jalan	156,437,294,975	146,376,509,025	33,459,590,000	114,500,797,334	145,666,575,118	148,828,472,614	125,441,851,650	27,297,956,452	110,201,832,530		95.14	85.70	81.58	96.2455			
8	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	4,024,029,687	3,748,580,000	953,210,400	n/a	n/a	3,676,955,424	2,282,557,097	918,304,380	n/a	n/a	91.37	60.89	96.34	n/a	n/a		
9	Program Administrasi Perkantoran	12,271,932,345	15,146,538,400	12,954,793,856	n/a	n/a	10,110,403,912	12,454,944,290	11,620,248,721	n/a	n/a	82.39	82.23	89.70	n/a	n/a		
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7,684,169,500	7,883,535,150	3,635,283,100	n/a	n/a	6,993,324,933	7,364,321,907	3,374,696,015	n/a	n/a	91.01	93.41	92.83	n/a	n/a		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	687,889,250	976,844,000	809,742,000	n/a	n/a	636,679,200	971,540,300	798,234,750	n/a	n/a	92.56	99.46	98.58	n/a	n/a		
12	Program Penyelenggaraan Perumahan	n/a	69,930,728,160	8,559,229,380	n/a	n/a	n/a	53,700,840,870	8,206,345,723	n/a	n/a	n/a	76.79	95.88	n/a	n/a		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	n/a	23,270,373,700	21,929,530,536	n/a	n/a	n/a	20,010,152,723	19,125,902,453	n/a	n/a	n/a	85.99	87.22	n/a	n/a		
14	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	n/a	21,641,291,969	14,646,124,100	n/a	n/a	n/a	19,341,946,028	11,013,827,944	n/a	n/a	n/a	89.38	75.20	n/a	n/a		
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku	n/a	28,205,994,500	2,878,572,400	n/a	n/a	n/a	17,797,741,734	2,810,020,278	n/a	n/a	n/a	63.10	97.62	n/a	n/a		
16	Program Pengelolaan Pertambangan	n/a	3,103,341,500	900,015,000	n/a	n/a	n/a	2,829,397,514	823,306,100	n/a	n/a	n/a	91.17	91.48	n/a	n/a		
17	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	n/a	12,620,051,433	3,937,255,000	n/a	n/a	n/a	7,487,799,064	2,756,363,350	n/a	n/a	n/a	59.33	70.01	n/a	n/a		
18	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	n/a	9,105,620,000	n/a	n/a	n/a	n/a	8,592,943,344	n/a	n/a	n/a	n/a	94.37	n/a	n/a	n/a		
19	Program Pengelolaan Air Tanah	n/a	n/a	12,994,160,500	n/a	n/a	n/a	n/a	11,269,968,850	n/a	n/a	n/a	n/a	86.73	n/a	n/a		
20	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	n/a	54,298,850,000	1,440,701,520	52,840,000,000	n/a	n/a	42,924,110,134	1,184,519,250	40,435,693,275	n/a	n/a	79.05	82.22	76.52	n/a		
21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	n/a	11,716,560,500	10,777,383,000	4,169,270,000	n/a	n/a	10,141,712,905	8,200,838,388	3,201,528,060	n/a	n/a	86.56	76.09	76.79	n/a		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	n/a	n/a	n/a	53,775,09 6,260	58,869,89 8,413	n/a	n/a	n/a	44,834,85 9,062		n/a	n/a	n/a	83.37			
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	n/a	n/a	n/a	48,335,76 7,060	66,081,01 6,000	n/a	n/a	n/a	47,469,76 4,297		n/a	n/a	n/a	98.21			
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	n/a	n/a	n/a	951,598,5 00	1,600,000, 000	n/a	n/a	n/a	848,458,2 50		n/a	n/a	n/a	89.16			
25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	n/a	n/a	n/a	7,084,260, 460	7,085,438, 460	n/a	n/a	n/a	5,927,459, 450		n/a	n/a	n/a	83.67			
26	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	n/a	n/a	n/a	14,448,26 5,000	37,210,00 0,000	n/a	n/a	n/a	2,898,027, 850		n/a	n/a	n/a	20.06			
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	n/a	n/a	n/a		10,115,00 0,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
28	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	n/a	n/a	n/a	1,260,160, 798	1,894,192, 798	n/a	n/a	n/a	1,182,214, 794		n/a	n/a	n/a	93.81			
29	Program Pengembangan Perumahan	n/a	n/a	n/a	21,516,18 5,000	21,415,00 0,000	n/a	n/a	n/a	16,446,36 0,633		n/a	n/a	n/a	76.44			
30	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	n/a	n/a	n/a	1,364,019, 000	1,508,112, 000	n/a	n/a	n/a	1,291,373, 324		n/a	n/a	n/a	94.67			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
31	Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara	n/a	n/a	n/a	1,552,777,000	1,747,200,000	n/a	n/a	n/a	1,467,879,629		n/a	n/a	n/a	94.53			
32	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	n/a	n/a	n/a	627,105,000	627,105,000	n/a	n/a	n/a	586,498,000		n/a	n/a	n/a	93.52			
33	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	n/a	n/a	n/a	3,648,615,000	3,797,005,000	n/a	n/a	n/a	1,940,965,332		n/a	n/a	n/a	53.20			
34	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	n/a	n/a	n/a	n/a	54,340,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut dari PP nomor 2 Tahun 2018 maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pada tahun 2019, bidang perumahan belum menganggarkan kegiatan untuk mendukung perhitungan SPM bidang Perumahan Rakyat, sehingga untuk target pencapaian spm dihitung berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi. Tahun 2020 kegiatan yang mendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Merapi.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

Mengacu pada sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun dan RPJMN dan yang implementasi pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral selama ini berbagai kebijakan telah banyak dilakukan. Kinerja pembangunan telah mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan.

Tantangan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang secara umum adalah :

1. Memberikan kontribusi secara nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Hal ini karena, meskipun angka kemiskinan di DIY mengalami penurunan selama lima tahun yaitu sebesar 0,56% per tahun yaitu dari angka 15,9% pada 2012 menjadi 13,1% di 2016 yang dalam konversi jiwa adalah sebanyak 488.830 jiwa, Persentase angka kemiskinan tersebut ternyata tertinggi se-Pulau Jawa dan terendah ketiga secara nasional.

Selain memiliki angka kemiskinan yang tertinggi se-Jawa, DIY juga memiliki angka ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional. Kesenjangan antara kaya dan miskin di DIY paling tinggi, yaitu 0,43 dibanding rasio nasional 0,3. Indeks Ketimpangan Pendapatan DIY menunjukkan bahwa pendapatan 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari tiga kali lipat pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah.

Disparitas regional secara ekonomi, yang sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY belum merata ke semua golongan masyarakat dan belum memenuhi harapan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya

Mineral di DIY yang direncanakan pada lima tahun mendatang nantinya dapat lebih terarah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada wilayah miskin di DIY dan sekaligus jugamemiliki daya ungkit yang besar terhadap pengentasan kemiskinan dan kesenjangan wilayah.

2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah

Kesenjangan antara target dan realisasi pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY lebih disebabkan pada faktor klasik yaitu pembiayaan. Kemampuan ruang fiskal daerah yang terbatas pada gilirannya menempatkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber APBN pada porsi yang lebih besar. Namun di sisi lain alokasi pembiayaan pembangunan yang bersumber APBN setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Oleh karenanya sumber pembiayaan lain yaitu yang tidak berasal dari APBN dan APBD harus menjadi pemikiran bersama dan orientasi bagi kita kedepan. Harus diakui pula bahwa sumber pembiayaan lain tersebut selama ini belum tergarap maksimal dan bahkan kita belum memiliki direktori khusus yang memuat item pekerjaan, volume dan lokasi pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dimana swasta atau pelaku usaha dapat terlibat dan berpartisipasi.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah

Seiring dengan ruang fiskal daerah yang terbatas untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur DIY maka kualitas belanja daerah yaitu anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta.

4. Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk serta kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi yang mendorong tingginya kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur serta

untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pengendalian pemanfaatan ruang secara khusus pada satuan unit permukiman agar pemenuhan terhadap cakupan pelayanan infrastruktur dapat optimal dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tantangan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang dirinci menurut sub urusan adalah :

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat maupun kegiatan lainnya seperti industri dan pariwisata. Penyediaan air baku yaitu dari sisi supply belum mencukupi bila dibandingkan demand yaitu untuk mendukung penyediaan air minum.
2. Sebagian besar DAS-DAS di WS Progo Opak Serang termasuk dalam kondisi DAS Prioritas I, yaitu DAS sangat kritis, yang perlu segera ditangani.

Selain hal tersebut kualitas air sungai di hampir semua sungai di WS Progo Opak Serang berada di bawah baku mutu kelas kualitas air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3. Banyak pemanfaatan lahan di WS Progo Opak Serang yang masih kurang sesuai dengan peruntukan / daya dukung lahan (RTRW), dan banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
 - Adanya daerah bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman.
 - Banyaknya penambangan bahan galian C yang kurang terkendali di sungai-sungai di WS POS.
 - Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.

- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi serta belum optimalnya upaya konservasi lahan dan air.
4. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
 - Terjadinya kekurangan air baku untuk air bersih dan air irigasi pada saat musim kemarau di beberapa lokasi di WS Progo Opak Serang.
 - Adanya permasalahan banjir rutin yang terjadi di beberapa wilayah di WS Progo Opak Serang, khususnya di daerah hilir.
 - Adanya permasalahan kekeringandan kelangkaan air di beberapa wilayah di WS Progo Opak Serang, khususnya pada saat musim kemarau.
 5. Masih rendahnya peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya air
 6. Kurangnya regenerasi petani yang tergabung dalam P3A (Perkumpulan petani pemakai Air)
 7. Konflik Petani Sawah dan Petani/Pembudidaya Ikan dalam pemakaian air dari saluran irigasi
 8. Adanya krisis koordinasi yang dialami oleh para *stakeholders* pengelolaan sumber daya air, khususnya di pihak regulator dan operator, yang mengakibatkan belum optimalnya koordinasi pengelolaan sumberdaya air di tingkat wilayah sungai
 9. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengelolaan SDA di wilayah sungai, khususnya yang terkait dengan dana untuk Operasi dan Pemeliharaan (OP)
 10. Informasi data sumber daya air yang kurang lengkap dan tidak menerus , serta data yang saling tumpang tindih antar stakeholder
 11. Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Pengelola Data Informasi.

12. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Jalan meliputi :

1. Penyediaan lahan untuk pembangunan jalan baru untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
2. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Selatan DIY, Pembangunan Ruas Prambanan – Gading, Pembangunan pada wilayah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
4. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mempertahankan kondisi mantap jalan dengan melakukan kegiatan yang akan memperlambat penurunan kondisi jalan.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Cipta Karya meliputi :

1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

4. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
5. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

1. Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
2. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme daya saing industri konstruksi khususnya para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah, antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
3. Masih adanya kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sepenuhnya sesuai standar.
4. Dinamika regulasi dalam hal pengadaan barang/jasa, ketenagakerjaan dan perizinan.
5. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
6. Adanya perubahan kebijakan tata kelola jasa konstruksi secara umum yang menyebabkan pembinaan jasa konstruksi menjadi terhambat.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Perumahan meliputi :

1. Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
2. Pembangunan kawasan permukiman baru seiring dengan beroperasinya Bandara NYIA dan implementasi hunian berorientasi transit (TOD)
3. Penuntasan penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan
4. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.

5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman
6. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,
7. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
8. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
9. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang ESDM meliputi :

1. Belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan (turunan) dari UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terutama dalam hal pengelolaan Air Tanah oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2. HAB tahun 2021 ini masih lebih rendah daripada Tarif Air Permukaan, sehingga masih belum sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mengutamakan penggunaan Air Permukaan daripada Air Tanah).
3. masih banyaknya kegiatan perusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya.
4. Meningkatkan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam Bauran Energi dan meningkatkan upaya konservasi energi. Potensi energi baru terbarukan di DIY yang terbatas dan belum maksimal dimanfaatkan menyebabkan persentase terbesar peran energi baru terbarukan dalam Bauran Energi berasal dari penggunaan Bahan Bakar Nabati sebagai campuran biosolar.
5. Mempertahankan dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
6. Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap energi listrik selain itu rumah tangga miskin telah menikmati listrik, namun belum memiliki meteran tersendiri sehingga tidak sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan dan pada sisi lain perlu adanya updating

data dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik serta membutuhkan sarana prasarana jaringan listrik.

7. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
8. Belum terbitnya Peraturan Presiden tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan ke provinsi, sesuai amanat UU No. 3/2020 dan PP No. 96/2021, sehingga pengelolaan pertambangan di daerah tidak optimal.
9. Belum optimalnya pencegahan dan penindakan kegiatan tanpa izin di DIY.
10. Belum sepenuhnya para pelaku usaha pertambangan melaksanakan teknis pertambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan maupun melaksanakan penatausahaan pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.
11. Regulasi baru di tingkat pusat perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat daerah sesuai kondisi potensi dan kearifan local daerah.

Peluang pengembangan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY secara umum berdasarkan pemenuhan target realisasi kinerja yang telah ditetapkan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya adalah :

1. Dukungan sumber daya manusia yang memadai di lingkungan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memberikan kontribusi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan
2. Perumusan program dan kegiatan berbasis kebutuhan dan keterpaduan dari setiap kawasan baik perkotaan maupun perdesaan.
3. Sinkronisasi kebijakan spasial, kebijakan sektoral, kebijakan fiskal melalui koordinasi dan komunikasi empatik baik melalui peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip-prinsip saling mengembangkan jejaring kerja, saling bersinergi dan saling percaya.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Jalan meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
3. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Upaya pelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air merupakan prioritas bagi Pemerintah Daerah DIY;
2. Mengamankan kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi dan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sepanjang sempadan sungai, danau, dan situ/embung;
4. Memelihara dan membangun bendungan-bendungan pada beberapa daerah aliran sungai untuk menjamin fungsinya sebagai pengendali banjir, sumber energi serta pemasok air baku;
5. Menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
6. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
7. Memanen air hujan; yaitu memanfaatkan air hujan untuk mengatasi krisis air, pengendali banjir.
8. Menarik minat petani baik petani sawah maupun ikan untuk mengelola P3A dengan menerapkan sistem irigasi yang bersegi kebudayaan

9. Menerapkan Sistem informasi Sumber Daya Air yang datanya cepat dan akurat

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Cipta Karya meliputi :

1. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
2. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

1. Keberadaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang jumlahnya cukup banyak di DIY dapat mendukung kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
2. Jumlah asosiasi konstruksi di DIY semakin bertambah sehingga dapat maksimal melakukan pembinaan.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Perumahan meliputi :

1. Kesadaran masyarakat semakin meningkat terhadap perwujudan komunitas yang sehat melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara swadaya;
2. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

1. Adanya kebijakan setempat di DIY yang menjadi acuan penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah melalui SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah & Penetapan NPA Paska Diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019
2. Adanya rencana *Review* kajian NPA tahun 2015 pada Tahun Anggaran 2022. *Review* ini direncanakan menghasilkan : komponen HAB yang relevan dan ideal terhadap perkembangan dinamika terkini, serta *Road Map* tahapan pengusulan HAB tersebut sebagai *draft* Keputusan Gubernur DIY minimal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
3. Adanya rencana untuk memperbanyak agenda *workshop* pembinaan penggunaan Air Tanah pada Tahun Anggaran 2022 yang menyasar peserta dengan volume penggunaan yang tinggi (berdasarkan data NPA).
4. Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
5. Perlu terus ditingkatkan sinergitas antara Tim Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi permasalahan pertambangan, khususnya penertiban PETI.
6. Kebutuhan bahan baku Industri dan Bahan Bangunan untuk pembangunan semakin meningkat perlu diikuti dengan pelayanan perizinan bidang pertambangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penguatan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di daerah, melalui: a. pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD

- Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
8. Pemanfaatan potensi energi setempat khususnya energi baru terbarukan (EBT) disamping mengandalkan alokasi penggunaan BBN, dalam pengembangan infrastruktur energi untuk mendukung peningkatan porsi EBT dalam Bauran Energi;
 9. Pengawasan terhadap :
 - a. penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2012;
 - b. penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
 - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
 10. Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
 11. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
 12. Penyediaan database di bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 13. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

BAB 3

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum.

A. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, sehingga penanganan sungai tidak dapat dilaksanakan secepatnya.
- (2) Penyediaan air baku belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri.
- (3) Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal
- (4) Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai
- (5) Terdapat defisit imbalanced air irigasi pada beberapa DI (*Water District*) di musim kemarau, serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- (6) Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

- (7) Pembagian kewenangan dalam penanganan Drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas, oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda DIY agar penanganan genangan menjadi lebih efektif;
- (8) Menurunnya kapasitas saluran drainase yang ada sehingga memunculkan genangan seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase

B. Penyelenggaraan Jalan

Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, utamanya di jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) dan jalan Selokan Mataram yang sesuai standard serta kondisi jaringan jalan yang tersedia belum seluruhnya dalam kondisi mantap.

C. Penyediaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan

- (1) Belum seluruh penduduk mendapatkan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak.
- (2) Akses sanitasi yang layak belum memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain dikarenakan belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, pengolahan persampahan regional sesuai standard dan ramah lingkungan serta sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota yang terintegrasi.
- (3) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat dan buangan sampah serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum ditreatment yang langsung dibuang mengalir ke sungai
- (4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi.
- (5) Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya.

- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi belum dilaksanakan secara optimal

D. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- (1) Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.
- (2) Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

2. Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Permukiman

- (1) Kesulitan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi
- (2) Fasilitasi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasara yang terbatas sesuai dengan keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- (3) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
- (4) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- (5) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (6) Masih adanya kawasan kumuh kewenangan pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota yang harus ditangani.

3. Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral

- (1) Belum optimalnya peningkatan akses ketersediaan energi listrik bagi masyarakat kurang mampu dan / atau yang tinggal di daerah terpencil

disebabkan validitas data.

- (2) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal yang disebabkan keterbatasan pemahaman.
- (3) Terdapat kegiatan pengambilan air tanah melalui sumur dalam yang tidak berijin;
- (4) Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi.
- (5) Terdapat kegiatan usaha pertambangan yang tanpa izin dan/atau melakukan kegiatan penambangan dengan kaidah-kaidah penambangan yang tidak benar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemetaan terhadap permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Aspek Capaian	Capaian Sasaran OPD	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Rekomendasi Pelayanan PD
			Pendorong	Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga tahun 2021 tercapai 100%	1. Terpenuhinya Indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY	1. Adanya komitmen dan kerjasama karyawan dan pimpinan OPD 2. Adanya SOP dalam pelayanan 3. Adanya pemanfaatan Sistem Informasi	Adanya regulasi dan rencana strategis PD	
Mewujudkan Pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	Penduduk berakses sanitasi dengan capaian persentasi pada tahun 2021 sebesar 96,18 %	1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang dilaksanakan oleh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten untuk peningkatan akses sanitasi di DIY	1. kapasitas IPAL yang terbatas sehingga butuh pengoptimalan kapasitas 2. Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis 3. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal	Kondisi lingkungan permukiman penduduk berada di kawasan permukiman padat sehingga tidak memungkinkan memiliki sistem pengolahan air limbah domestik dengan skala kawasan atupun individual Pembagian kewenangan dalam penanganan Drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas, oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda DIY agar penanganan penanganan menjadi lebih efektif;

Aspek Capaian	Capaian Sasaran OPD	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Rekomendasi Pelayanan PD
			Pendorong	Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penduduk berakses Air minum dengan capaian persentasi pada tahun 2021 sebesar 92,90 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi taget dan capaian 2. RISPAM 3. RPJMD DIY 	Target RPJMN yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses aman air minum. Adanya pendanaan dari pusat baik melalui Kementerian PUPR maupun Dana DAK untuk meningkatkan akses air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi pelayanan sarana dasar penyediaan air minum yang aman dan terlindungi bagi masyarakat karena kondisi geografis dan belum terlayani sistem penyediaan air minum 2. kebutuhan air bersih untuk sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa dapat mendorong aktivitas ekonomi/produktivitas 3. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan 	Cakupan pelayanan dan Penyediaan air baku

Aspek Capaian	Capaian Sasaran OPD	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Rekomendasi Pelayanan PD
			Pendorong	Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi 85,5%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY 	Peran aktif dari P3A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pematian air, akses jalan, kondisi cuaca; 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran untuk Pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kondisi dan kinerja jaringan irigasi yang ada; 2. Mengusulkan kembali Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi
	Meningkatnya aksesibilitas wilayah dengan capaian kinerja 98,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY 	Meningkatnya jumlah kendaraan dan perkembangan pariwisata dan pusat kegiatan yang ada di DIY	Kapasitas jalan provinsi masih kurang dan kondisi kemantapan jalan provinsi juga kurang mantap	Peningkatan jalan provinsi dan pembangunan jalan baru sebagai alternatif meningkatnya aksesibilitas wilayah
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi (98,82 %)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM & Prasarana 2. LHU yang diterbitkan melebihi target. 	Sertifikasi belum bisa dilaksanakan karena : <ol style="list-style-type: none"> a) berdasarkan SE Menteri No. No. 02/SE/M/2021 Biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN; b) Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta, kesulitan mendapatkan peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan identifikasi potensi kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah menengah atas, asosiasi, lembaga sertifikasi profesi 2. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan 3. mengikuti perkembangan hukum dan aturan jasa konstruksi di Indonesia

Aspek Capaian	Capaian Sasaran OPD	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Rekomendasi Pelayanan PD
			Pendorong	Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang bersedia mengikuti sertifikasi akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum	
	Rumah tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau dengan capaian kinerja 97,75 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 2. RPJMD DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota 2. Pelaksanaan perumahan subsidi masih menjadi prioritas pemerintah pusat meskipun anggaran APBN sebagai salah satu stimulan ke pada MBR 3. Adanya SK kabupaten / Kota yang bisa mensinkronkan lokasi dan jenis kegiatan pada penanganan kawasan kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak pandemi Covid menyebabkan menurunnya jumlah angka pembelian perumahan bersubsidi 2. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang memiliki nama dan indikator berbeda yang menyulitkan penghitungan capaian. 3. Penanganan oleh Pusat yang memprioritaskan kws kumuh perkotaan sehingga kws kumuh perdesaan yang menjadi terabaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kabupaten / kota untuk menghitung capaian penanganan kws kumuh 2. Mendorong penanganan kawasan kumuh di perdesaan melalui program reguler non penanganan kawasan kumuh dan CSR. 3. Mendorong pembangunan perumahan dari berbagai sektor pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran melalui CSR
	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik dengan capain kinerja di tahun 2022 99,99%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian 	Peran serta masyarakat secara swadaya, PT PLN dan Kementerian ESDM, sangat signifikan dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY berupaya meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data

Aspek Capaian	Capaian Sasaran OPD	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Rekomendasi Pelayanan PD
			Pendorong	Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. RPJMD DIY	upaya meningkatkan dan mempertahankan rasio elektrifikasi	<p>masyarakat tidak mampu melalui skema subsidi.</p> <p>2. Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik</p>	<p>PLN dan telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM;</p> <p>2. Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN</p>
	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dengan capaian di tahun 2022 sebesar 100%	<p>1. Terpenuhinya indikasi target dan capaian</p> <p>2. RPJMD DIY</p>	<p>1. Meningkatnya Kesadaran pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban dalam dokumen perizinan</p> <p>2. Kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin</p>	<p>1. Kurangnya Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam dokumen perizinan</p> <p>2. Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum berizin</p>	Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berlaku kepada pengguna air tanah untuk keperluan usaha dan pelaku usaha pertambangan

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN OPD KABUPATEN/KOTA

3.3.1 Telaah Renstra pada kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

A. Kondisi Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasarrakyat seperti pangan,sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegangperanan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untukmendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisiendengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender sertaberlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsippembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarangtanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain:

- (1) Indikator ekonomimakro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi;

- (2) Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan
- (3) Dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- (1) Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- (2) Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku
- (3) Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- (4) Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Pembuangan Akhir (TPA)

masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

- (6) Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- (7) Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.
- (8) Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- (9) Aspek kualitas Jalan terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah dan kualitas jalan yang ada belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan.
- (10) Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan
- (11) Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut: 1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu. 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Tujuan

- i. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- ii. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- iii. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- iv. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- v. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis,

Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator:
 - 1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan;
 - 2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur;
 - 3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

- i. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;

3. Kapasitas tampung per kapita;
 4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- ii. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
 - iii. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
 - iv. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 2. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
 - v. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem,

kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
5. tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Kebutuhan air baku semakin meningkat dan Konservasi sumber daya air	Keterbatasan sumber air baku dan perubahan penggunaan lahan pada daerah resapan air	penyediaan sumber-sumber air baku baru dan peneggakan pengendalian pemanfaatan ruang
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,	Konektifitas antar wilayah dalam mendukung aksesibilitas kawasan	Penyediaan lahan untuk membangun jalan baru	Peningkatan kualitas jalan dan jembaytan yang menjadi kewenangan propinsi
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersedian sarana dan prasana infrastruktur permukiman 2. Kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman 2. Harga lahan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman 2. Penyediaan permukiman vertical di kawasan perkotaan

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Kualitas pekerja konstruksi	Belum terstandarisasinya kualitas pekerja konstruksi	Keberadaan perguruan tinggi di DIY sebagai center of excelcent
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.			

1.3.2 Telaah Renstra pada Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 16 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2020-2024.

A. Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- (1) Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga disisi hilir pemerintah masih harus mengimpor dalam jumlah relative besar untuk memenuhi kebutuhan bakar di dalam negeri;
- (2) Terjadinya tumpang tindih lahan, permasalahan tata ruang dan permasalahan sosial

- (3) percepatan pencapaian porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik
- (4) Bauran Energi (emergi mix) Nasional masih didominasi oleh BBM.
- (5) Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM.
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
- (7) Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan
- (8) Rasio elektrifikasi di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 99,99 %.
- (9) Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, dikibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga listrikan oleh pemerintah.
- (10) Masih banyaknya perizinan Pertambangan di daerah yang belum mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.
- (11) Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

B. Visi

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka

Presiden mencanangkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Maka visi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

C. Misi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan 6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

D. Tujuan

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Optimalisasi kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;	-	-	-

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral;	-	-	-
3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;	Pengambilan air tanah dan pertmbangan tidak memiliki ijin	Kurangnya informasi mekanisme perijinan Pengambilan air tanah dan pertmbangan sesuai dengan rencana tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
4	Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;			
5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;	-		
6	Layanan sektor ESDM yang optimal;	Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu	Kondisi geografis dan belum memilikimeter listrik	Program elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
7	Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;	-		
8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;	Pengambilan air tanah dan pertmbangan tidak memiliki ijin	Kurangnya informasi mekanisme perijinan Pengambilan air tanah dan pertmbangan sesuai dengan rencana tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
9	Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi energi baru terbarukan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan masih terbatas-	Ketergantungan terhadap energy fosil	Keberadaan perguruan tinggi di DIY sebagai center of excelcent
10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;	-		

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
11	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;	-		
12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan			
13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.			

1.3.3 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta : “Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat”.

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

Tabel 3. 4 Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20 %	75,56 %	78,07 %	80,58 %	83,10 %	85,61 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23 %	90,17 %	91,16 %	92,38 %	93,55 %	94,89 %

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE Tahun	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	6	
1.	Presentasi kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	82%	82	84	86	88	90	92	92
2.	Persentase Kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	21	21	30	40	50	60	70	70
3.	Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	73%	73	73,50	74	74,50	75	75,50	75,50
4.	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbah	90,73	90,73	91,29	91,85	92,42	92,98	93,54	93,54
5.	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86	86	87	88	89	90	91	91
6.	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	91,8	91,8	93,0	94,2	95,5	96,7	98	98
7.	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22	83,22	84	84,06	85,09	86,21	87,62	87,62

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Cakupan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Penentuan prioritas dan Ketersediaan lahan	Komitmen dan role sharing peningkatan cakupan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Lingkungan permukiman padat penduduk dan berada di bantaran sungai	Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman secara swadaya

1.3.4 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yaitu Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik dengan indikator tujuan indeks kualitas infrastruktur. Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik
- b) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian indikator kinerja	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur			N/A	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08%	79,08%
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat kemantapan jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
				Rasio Bangunan yang laik fungsi	N/A	0,40 %	0,45%	0,50 %	0,55%	0,60%	0,60%
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
				Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
				Penduduk berakses sanitasi layak	84,83	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian indikator kinerja	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kualitas kawasan kumuh permukiman	Penangan Kawasan Kumuh	92,49%	10,59	21,18	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Cakupan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Kewenangan penanganan	Komitmen dan role sharing peningkatan cakupan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			

1.3.5 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

Secara umum tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Review RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis yaitu

- (1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- (2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- (3) Meningkatkan Infrastruktur Perekonomian dan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
- (4) Meningkatkan akses air bersih, penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Pasca Bencana.

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
- (3) Meningkatnya kualitas prasarana pendidikan.
- (4) Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan.
- (5) Meningkatnya kinerja sarana prasarana irigasi dan penampung air lainnya
- (6) Meningkatnya infrastruktur air bersih
- (7) Meningkatnya akses air bersih
- (8) Berkurangnya Kawasan Kumuh
- (9) Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana.

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	-	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas prasarana pendidikan.	-	-	-
4	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan.	Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah	Keterbatasan lahan	Komitmen penanganan sesuai dengan kewenangan
5	Meningkatnya kinerja sarana prasarana irigasi dan penampung air lainnya	Cakupan daerah irigasi	Luasnya daerah irigasi dan alih fungsi lahan pertanian	Pembangunan embung dan
6	Meningkatnya infrastruktur air bersih	Penyediaan air baku	Keterbatasan kapasitas sumber air baku	Komitmen pemda untuk peningkatan distribusi pelayanan
7	Meningkatnya akses air bersih	Akses masyarakat terhadap air bersih	Cakupan pelayanan terkendala kondisi geografis	Distribusi air curah

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
8	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh	Integrasi penanganan kawasan kumuh dengan infrastruktur dasar permukiman	Komitmen penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan
9	Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana.	-	-	-

1.3.6 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Review RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2022-2026.

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah

- (1) Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum
- (2) Indeks Infrastruktur Meningkat
- (3) Penanganan Infrastruktur Irigasi
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah -	Kondisi alam dan geografis	Komitmen pemda untuk peningkatan aksesibilitas wilayah
2	Indeks Infrastruktur Meningkat	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Biaya distribusi dan peningkatan cakupan pelayanan relatif mahal	-
3	Penanganan Infrastruktur Irigasi	Peningkatan daerah irigasi	Kebutuhan air bersih pada musim kemarau untuk kegiatan non pertanian	Komitmen penanganan sesuai dengan kewenangan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	

3.3.7 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo adalah :

“Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”

Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
- (2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3. 11 Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	satuan	Tahun transisi 2017	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
						I	II	III	IV	V
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan infrastruktur	%	68,80	72,21	73,92	75,90	79,52	82,01
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Nilai	68,65	68,79	68,93	69,07	69,22	69,60

Sedangkan Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun Transisi 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam kondisi baik	%	73,26	74,63	76,36	78,04	79,64	81,15	82,59	82,59
2	Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat	%	74,12	78,57	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
3	Capaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi dan drainase pengairan dalam kondisi baik	%	78,45	79,64	80,87	82,11	83,3	84,52	85,56	85,56
4	Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	%	72,92	73,08	-	-	-	-	-	73,08

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun Transisi 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
					2018	2019	2020	2021	2022	
5	Capaian layanan air bersih dan air limbah	%	66,48	66,8	67,29	67,66	67,84	67,93	67,94	67,94
6	Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	%	70,34	74,58	-	-	-	-	-	74,58
7	Cakupan taman dalam kondisi baik, layanan persampahan	%	62,45	67,45	68,14	68,26	67,75	72,79	80,83	80,83
8	Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan sehat	%	40,97	41,94	42,01	42,15	42,22	42,36	42,43	42,43
9	Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan	%	58,95	100						100
10	Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi baik	%	81,77	82,48	83,81	84,51	85,56	87,21	87,93	87,93
11	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	-	324,54	344,43	269,18	259,36	280,45	337,88	1.815,84
12	Capaian sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Rp.	-	1.771,78						1.771,78
13	Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	Rp.	-	74,38	76,93	58,09	55,97	60,52	72,91	2.096,20
14	Capaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Rp	-	-	1502,35	1502,35	1447,52	1565,28	1885,78	8.381,63

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 13 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah	Kondisi alam dan geografis	Komitmen pemda untuk peningkatan aksesibilitas wilayah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Biaya distribusi dan peningkatan cakupan pelayanan relatif mahal	-

1.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata ruang Wilayah DIY telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039. Perda ini menjadi acuan untuk mempermudah implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

a. Telaah terhadap Struktur Ruang

1. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Pada sistem jaringan jalan dilakukan pengembangan jaringan jalan nasional dan Pengembangan jaringan jalan provinsi
2. Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan angkutan masal
3. Sistem perparkiran dilakukan melalui pelarangan parkir di badan jalan, menyediakan parkir di luar badan jalan dengan membangun gedung atau

- taman parkir pada pusat kegiatan. Penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda dilakukan secara terintegrasi dengan sistem angkutan jalan
4. Pengembangan sistem dan prasarana pedestrian dan sepeda diarahkan berada di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan TOD, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan jaringan angkutan umum berikut fasilitas pendukung dengan memperhatikan aksesibilitas penyandang cacat
 5. Sistem dan prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor diarahkan berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan dan dekat dengan jaringan jalan arteri serta terintegrasi dengan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian
 6. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian untuk menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar. Sistem jaringan transportasi dilakukan di permukaan, layang dan/atau bawah tanah. Jaringan perkeretaapian terdiri jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum, stasiun kereta api besar, sedang, kecil, dan barang.
 7. Sistem dan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan meliputi sistem, sarana, prasarana dan teknologi yang digunakan. Sistem dan jaringan transportasi sungai berwujud alur sungai dan/atau kanal untuk keperluan angkutan sungai dan/atau kanal dengan memperhatikan debit sungai dan/atau kanal saat musim hujan dan musim kemarau.
 8. Pengembangan Sistem jaringan transportasi laut dilakukan melalui pengembangan tatanan kepelabuhanan dan Pemanfaatan alur pelayaran
 9. Pengembangan Sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan pengembangan bandar udara di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan kawasan bandar udara di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan melengkapi fasilitas transportasi yang mengkombinasikan angkutan multimoda berupa angkutan bus dan kereta api, Pengembalian fungsi Bandar Udara Adisutjipto kepada TNI AU untuk digunakan sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus dan Lapangan Terbang Gading

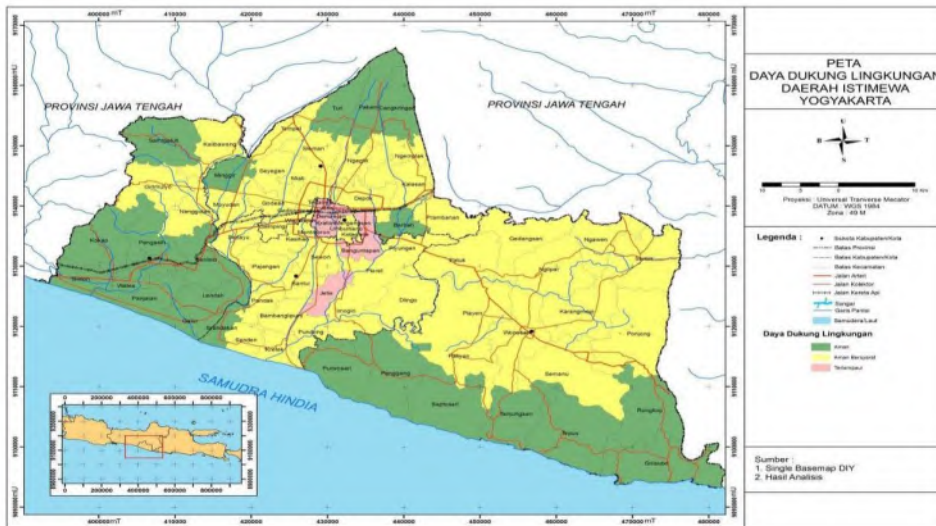
- sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus.
10. Pengembangan Sistem jaringan energi dilakukan dengan mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan. Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara pengamanan fungsi Terminal BBM dan Stasiun Rewulu di Kec. Sedayu, pengamanan fungsi jalur pipa penyalur BBM Cilacap-Boyolali sebagai jalur suplai BBM, pengembangan depot penyuplai BBM Bandara di Kec. Temon dan Pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY. Pengembangan ketenagalistrikan dilakukan dengan pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional, pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo, dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, pengembangan energi listrik tenaga bayu dan tenaga surya di pantai selatan, peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industry, pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY, transmisi energi listrik dengan pembangunan GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi), SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Gardu Induk, SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang, dan distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 11. Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan pengembangan jaringan tetap dan jaringan bergerak. Pengembangan jaringan tetap terdiri dari sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional, sistem jaringan telekomunikasi menuju *smart city*, jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan telekomunikasi nasional di setiap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah, jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata; dan jaringan

- telekomunikasi dengan teknologi serat optik sedangkan jaringan bergerak berupa pengembangan menara BTS.
12. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa sumber air dan jaringan sumber daya air, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik, sistem distribusi air minum, sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku
 13. Pengembangan Sistem jaringan Pengolahan Air Limbah berupa pengembangan dan pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta, pembangunan IPAL terpusat berskala kota, pembangunan IPAL terpusat berskala kawasan, pembangunan dan pengembangan IPAL terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani IPAL terpusat berskala regional dan/atau kota, pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
 14. Pengembangan Sistem jaringan Persampahan berupa pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) untuk mendukung sistem 3R di seluruh Kabupaten dan kota, pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kec. Piyungan Kabupaten Bantul, dan pengembangan dan pengelolaan TPA sampah di Kec. Nanggulan dan Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan TPA sampah di Kec. Wonosari Kabupaten Gunungkidul
 15. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase berupa pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase dengan menerapkan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir

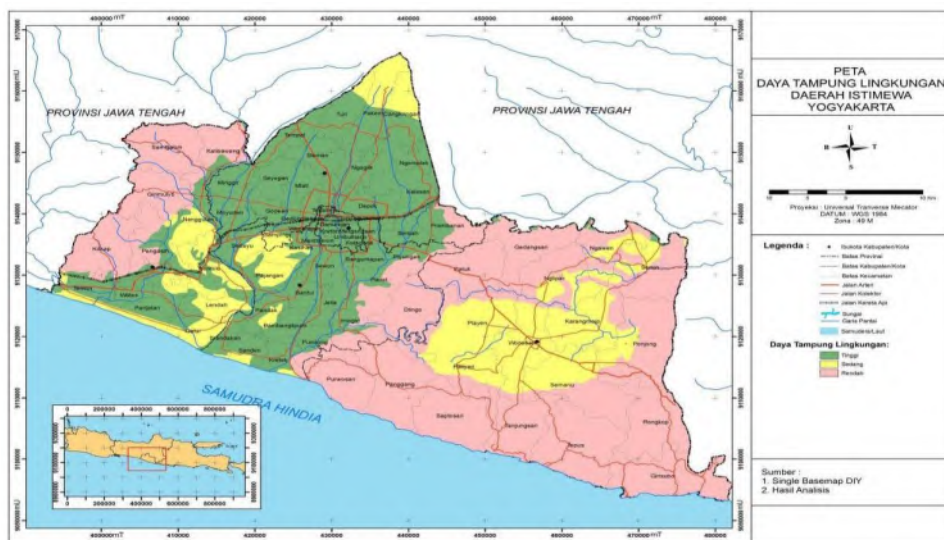
b. Telaah terhadap Pola Ruang

1. Rencana Pola Ruang DIY terdiri atas Kawasan lindung dan budidaya dan digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000
2. Penetapan kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, konservasi, lindung geologi, ruang terbuka hijau, rawan bencana dan lindung lainnya.
3. Penetapan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan hutan lindung, resapan air, dan transisi resapan air.
4. Penetapan Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk, dan sekitar mata air;
5. Penetapan Kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA) yang meliputi Cagar alam dan Suaka margasatwa dan berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang meliputi Taman nasional, Taman hutan raya; dan Taman wisata alam.
6. Penetapan Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi; dan Kawasan perlindungan air tanah ;
7. Penetapan Kawasan ruang terbuka hijau berada di Kabupaten dan kota di DIY;
8. Penetapan Kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana alam geologi, tanah longsor, tsunami, gelombang pasang, banjir, gempa bumi, dan kekeringan
9. Penetapan Kawasan lindung lainnya yaitu kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
10. Penetapan kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan pertambangan, peruntukan industry, peruntukan pariwisata, peruntukan permukiman, dan peruntukan budidaya lainnya.

Isu lingkungan hidup dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dapat digambarkan dari kondisi daya dukung dan daya tampung (DDDT) di masing-masing arahan. Perbandingan tersebut akan menunjukkan lokasi arahan pola dan struktur ruang yang berada di daerah dengan DDDT rendah atau terlampaui. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menetapkan arahan yang menjadi fokus dalam kajian lingkungan hidup RTRW. Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan menghasilkan peta-peta sebagai berikut.

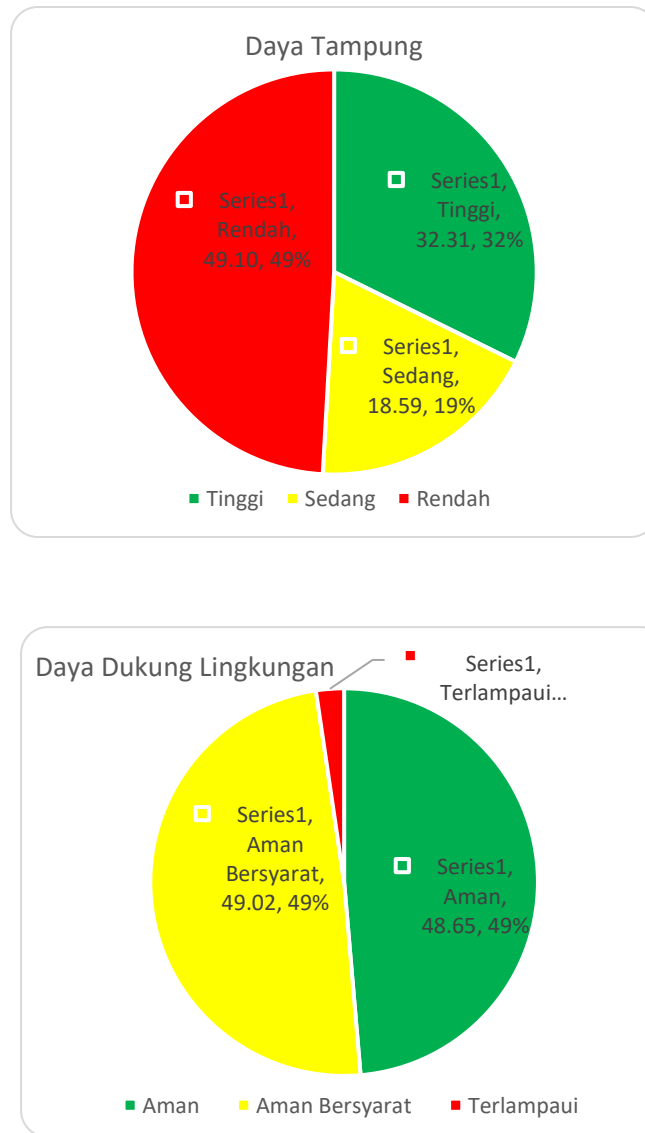


Gambar 3. 1. Daya Dukung Lingkungan DIY
(Sumber : Bappeda DIY, 2018)



Gambar 3. 2. Daya Tampung Lingkungan DIY
(Sumber : Bappeda DIY, 2018)

Dari hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan, dapat dirumuskan 0 yang menunjukkan persentase luas wilayah DIY berdasarkan klasifikasi DDDT.



Gambar 3. 3. Persentase Wilayah berdasarkan klasifikasi Daya Dukung dan Tampung (Sumber : Bappeda DIY, 2018)

Perbandingan antara arahan pola ruang RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dengan klasifikasi DDDT ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 14 Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2019 - 2039 terhadap daya dukungnya

POLA RUANG	AMAN	AMAN BERSYARAT	TERLAMPAUI	GRAND TOTAL
Bandar Udara	614,07	279,32		893,39
Cagar Alam Geologi		141,52		145,18
Danau / Waduk	151,19			151,19
Hutan Lindung	495,25	1799,67		2294,93
Hutan Penelitian		101,64		101,64
Hutan Produksi	3884,72	9554,48		13439,28
Hutan Rakyat	10028,82	9089,56		19140,79
Kawasan Konservasi	2042,93	1013,98		3113,13
Kawasan Perlindungan Setempat	2442,76	4106,92	194,88	6838,09
Kawasan Peruntukan Industri	3871,98	1717,81		5589,79
Kawasan Peruntukan Pertanian	74050,98	96288,35	1695,80	172703,10
Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi		25,95		25,95
Pelabuhan	23,07			23,07
Permukiman	22003,78	59569,99	5421,84	87227,81
Rawan Bencana Alam Geologi	3337,24			3355,86
Sungai	760,76	1427,19	74,99	2301,92
GRAND TOTAL	123707,566	185116,3984	7387,519179	317345,1353

Tabel 3. 15 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2020 dirinci Menurut Kabupaten/Kota di DIY

Kabupaten/ Kota	Sesuai (ha)	Belum Terwujud (ha)	Tidak Sesuai (ha)	Grand Total (ha)
Bantul	42.356,09	5.237,13	3.558,11	51.151,33
Gunung Kidul	116.244,43	25.674,17	5.704,60	147.623,19
Kota Yogyakarta	3.209,80	25,26	44,61	3.279,67
Kulonprogo	42.084,99	10.209,74	5.583,23	57.877,96
Sleman	46.669,72	7.222,41	3.541,80	57.433,93
Grand Total	250.565,01	48.368,71	18.432,36	317.366,08

Sumber : Bappeda 2020

Tabel 3. 16 Rincian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2020 dirinci Menurut Pemanfaatan di Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten	% ketidaksesuaian ruang dari total wilayah	Peruntukan kawasan dominan yang tidak sesuai	Pemanfaatan existing
1	Gunung Kidul	4,383	Hutan rakyat (23,23%)	Permukiman (72,18%)
2	Bantul	7,459	Sempadan Pantai (44,23%)	Pemukiman (89,48%)
3	Sleman	5,763	Sempadan sungai (23,77%)	Permukiman (95,40%)
4	Kulon progo	6,396	Sempadan pantai (40,06%)	Pemukiman (92,13%)
5	Kota Yogyakarta	1,365	Sempadan sungai (96,52%)	Pemukiman (91,19%)

Sumber : Bappeda 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pembangunan permukiman di DIY memberikan kontribusi terbesar terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW DIY 2019-2039. Sehingga berdasarkan hal

tersebut maka dalam rangka perwujudan permukiman layak dan penyediaan PSU pada kawasan permukiman yang akan diintervensi melalui program/kegiatan juga perlu memperhatikan kesesuaian kawasan permukiman terhadap RTRW DIY 2019-2039. Selain itu juga intervensi terhadap kawasan permukiman yang saat ini tidak sesuai dengan peruntukan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan permukiman.

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan RPJMN, Pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Kerangka utama tersebut didukung oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah), pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani OPD dalam pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun mendatang melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah :

1. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

D.I Yogyakarta diamanatkan Penyediaan akses bagi rumah tangga untuk menempati hunian layak menjadi 87,6% rumah tangga di dalam RPJMN.

2. Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target RPJMN akses air minum layak

sebesar 100% di DI Yogyakarta. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.

3. Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman

Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak secara nasional sudah mencapai 74,58 persen dengan provinsi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta. Didalam RPJMN mengamanatkan Penyediaan akses sanitasi untuk mencapai target 2024 sebesar 95% di D.I. Yogyakarta dan akses penanganan sampah sebesar 83%.

4. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas

Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan.

5. Konektivitas Jalan

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur

logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km

6. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.

7. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak” diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal. Di antara tujuan SDGs terdapat 3 (tiga) *Global Goals* Tujuan Global yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY, yaitu TBP 6 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua, yang terdiri dari 6 indikator utama; TBP 6 yakni Energi Bersih dan Terjangkau dan TBP 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang terdiri dari 7 indikator utama.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam SDGs secara umum sejalan dengan arahan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan TBP :

1. Tanpa Kemiskinan

Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :

- a. Penanganan kawasan kumuh
- b. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesenjangan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b. Penambahan kapasitas air baku
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
 - d. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
 - e. Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
 - f. Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai
7. Energi Bersih dan Terjangkau
- Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :
- a. Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)
 - b. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
 - c. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy
 - d. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :
- Peningkatan pengelolaan persampahan regional
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel 3. 17 Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY		Tujuan TPB	
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6)
		2	Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
		3	Penanganan perubahan iklim (tujuan 13)
		4	Ekosistem Lautan (tujuan 14)
		5	Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1	Tanpa Kelaparan (tujuan 2)
		2	Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih Tingginya ketimpangan wilayah	1	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
		2	Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	1	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	1	Tanpa Kemiskinan (tujuan 1)
		2	Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	1	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	1	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>) pada semua lini pemerintahan	1	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1	Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7)
		2	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8)
		3	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
		4	Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	1	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya dikembangkan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural

Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat
3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Tujuan 2 : Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)

Sasaran :

4. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Sehingga dengan demikian maka tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 tersebut merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya dalam kurun waktu lima tahun.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi dan memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap 3 (tiga) sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (sasaran 1)

Indikator sasaran :

- Pertumbuhan Ekonomi
- Ketimpangan wilayah (Indeks Gini dan Indeks Williamson)

2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat (sasaran 2)

Indikator sasaran :

- Indeks Pembangunan Manusia
- Tingkat Kemiskinan

3. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan (sasaran 4).

Indikator sasaran :

- Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya.

Tabel 4. 1.Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN OPD		Satuan
	SASARAN	INDIKATOR	
I	Tujuan 1 <i>“Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral”</i>		
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	%
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%
8	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%
II	Tujuan 2 : <i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”</i>		
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
1 Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	1 Penduduk Berakses Sanitasi	1 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1 Meningkatkan rumah tangga yang sampahnya terlayani (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di TPA Regional
		2 Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mempertahankan Kualitas Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan	1 Parameter BOD dalam Efluent hasil pengolahan air limbah domestik < 75
		3 Peningkatan kontribusi bagi warga negara terhadap akses sanitasi	1 warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional
		4 Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1 Pengurangan genangan di kawasan perkotaan dan strategis DIY
	2 Penduduk Berakses Air Minum	1 Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1 Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh air curah regional

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
			2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Curah Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan
	3 Penyediaan infrastruktur sumber daya air	1 Penambahan dan Pengelolaan Air Baku	1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
		2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	1 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 77,50 persen
	4 Peningkatan aksesibilitas Jalan	1 Kondisi jalan provinsi mantap	1 Dukungan Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru
		2 Peningkatan panjang jalan propinsi	1 Pembangunan jalan baru
	5 Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	1 Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU nya	Penanganan rumah terdampak bencana

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
		2 Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni
		3 Penyediaan perumahan	Pengembangan dan pemanfaatan lahan peruntukan permukiman
		4 Penanganan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY
		5 Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung mendukung fungsi permukiman
		6 Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	1 Pengelolaan ketenagalistrikan
	2 Pengelolaan Energi terbarukan		2 Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
			1 Peningkatan penyediaan pemanfaatan enegi
			2 Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
	7 Meningkatkan kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 Mempertahankan rerata Muka Air Tanah pada Zona Aman	1 Konseervasi Sumber Daya Air Tanah melalui pengendalian rerata penurunan Muka Air Tanah < 20 %
		2 Meningkatkan pelaksanaan pengusahaan air tanah	1 Pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan
		3 Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan	1 Pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik
		4 Meningkatkan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan	1 Pengusahaan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan
	8 Peningkatan kinerja jasa konstruksi	1 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih
			Penyediaan dan pemutahiran data melalui sistem informasi pembina jasa konstruksi
		2 Sertifikat hasil uji	Penerbitan sertifikat hasil uji

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
		3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara dan penataan Bangunan	1 Menerbitkan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangun gedung negara yang
			2 Pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung negara
			3 Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis penyelenggaraan bangunan gedung bagi OPD provinsi dan kota/kabupaten
	9 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program	Output pelaksanaan program yang terukur

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu Tahun 2023 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah DIY. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan yang akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD DIY, APBN, DAK, APBD Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lain. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam matriks program lima tahunan berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	A																			
Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral				Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	1			Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	92,92 %	94,14 %		95,28%		95,8%		96,48%		97,15%		97,15%			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	38,65%	24,04 %	4,156,960,000	14,78%	22,208,780,600	15,82%	7,753,594,240	16,86%	3,743,392,000	17,9%	26,560,798,400	17,9%	60,266,565,240		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100%	100 %	4,156,960,000	100 %	22,208,780,600	100 %	7,753,594,240	100 %	3,743,392,000	100 %	26,560,798,400	100 %	60,266,565,240	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Jakstrada Air Minum DIY		100 %	400,000,000	1 rapergub	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1 rapergub	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Penyusunan AMDAL SPAM Regional Banyusoco		100 %	0	N/A	0	N/A	300,000,000	N/A	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				DED Penyelenggaraan SPAM Regional Banyusoco		100 %		N/A		N/A		1 dokumen		N/A		N/A			
				Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM Regional Banyusoco		100 %		N/A		1 dokumen		N/A		N/A		N/A			
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Penyusunan DED SPAM Regional Kartmantul Sub sistem Metes-Sukoharjo		100 %	0	N/A	14,100,000,000	N/A	640,000,000	1 dokumen	0	N/A	7,250,000,000	N/A	21,990,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Perluasan SPAM Regional Kartamantul Sub Sistem Metes - sukoharjo		100 %		N/A		N/A			1 paket			1 paket			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				DED Optimalisasi Pemanfaatan SPAM Regional Kartamantul (Perbaikan Jaringan dan Bak Reservoir Sambikerep Kab. Bantul dan Sleman)		100 %		1 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A				
				Perluasan SPAM Regional Kartamantul (Reservoir Sambikerep)		100 %		N/A		1 paket		N/A		N/A		N/A				
				Perluasan SPAM Regional Kartamantul Sub Sistem Tambak-Bangunharjo		100 %		N/A		N/A		N/A		1 paket		1 paket				
				Pembangunan Talud IPA Kebon Agung		100 %		1 paket		0		0		0		0				
				Penyusunan DED SPAM Regional Kartamantul Sub Sistem tambak-bangunharjo		100 %		N/A		1 dokumen		N/A		N/A		N/A				
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Subsidi Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	0	100 %	0	1 unit SPAM Kartamantul	5,208,780,600	1 unit SPAM Kartamantul	4,113,594,240	1 unit SPAM Kartamantul	3,043,392,000	1 unit SPAM Kartamantul	2,510,798,400	1 unit SPAM Kartamantul	14,876,565,240	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.03 .1.01.1 0	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Rekomendasi Perluasan Pengembangan Pelayanan Air Curah Regional	0 Berkas/ Dokumen	100 %	229,960 ,000	1 Berkas/ Dokumen	1,000,00 0,000	0 Berkas/ Dokumen	1,100,0 00,000	0 Berkas/ Dokumen	400,000 ,000	0 Berkas/ Dokumen	400,000 ,000	1 Berkas/ Dokumen	2,900,00 0,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Identifikasi Potensi Jaringan Hilir untuk Optimalisasi Penggunaan SPAM Regional Kartamantul	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			
				Hasil Pemantauan Keberlanjutan Pelayanan Air Minum SPAM Lintas Kabupaten/Kota	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Pemantauan Kinerja Perumda Air Bersih Tirtatama	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Pembinaan dan Pengawasan Pencapaian SPM Kab/Kota Bidang Air Minum	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Dokumen Database Pelanggan SPAM Regional Kartamantul	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelola Penyedia Air curah Regional	0 Dokumen	100 %		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.03.03 .1.01.1 1	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan DPPT		100 %	3.527.000,000	1 dokumen	1.900,000,000	0 dokumen	1.600,000,000	0 dokumen	0	0 dokumen	16.100,000,000	1 dokumen	19.600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pengadaan lahan SPAM Regional Kartamantul (Reservoir Sambikerep)		100 %		3000 m2		2000 m2		0 m2		23000 m2		23000 m2			
	2 Penduduk Berakses Sanitasi			Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	96,18 %	94,25 %		94,9%		96,07%		96,54%		97,23%		97,23%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	0 m3	384.723 m3	100,005,916,870	541.212 m3	74,800,000,000	616.076 m3	52,100,000,000	616.076 m3	730,000,000	616.076 m3	1,030,000,000	616.076 m3	128,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.04 .1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	N/A	100 %	100,005,916,870	100 %	74,800,000,000	100 %	52,100,000,000	100 %	730,000,000	100 %	1,030,000,000	100 %	128,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.04 .1.01.0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun		100 %	0	0	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	0	0	0	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.03.04 .1.01.0 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan		100 %	50,002,958,435	1 dokumen	65,300,000,000	N/A	50,000,000,000	N/A	0	N/A	0	N/A	115,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantu I
				Pengadaan Lahan TPA Transisi Piyungan		100 %		8.900 m2		N/A		N/A		N/A		N/A			
				Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II		100 %		1 paket		1 paket		N/A		N/A		N/A			
				Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III		100 %		3,5 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A			
		1.03.04 .1.01.0 4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	perbaikan jalan masuk ke TPA Piyungan		100 %	50,002,958,435	N/A	9,000,000,000	1 paket	2,000,000,000	N/A	0	N/A	0	N/A	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantu I
				Pekerjaan Pemasangan Pagar dan Buffer Zone di TPA Piyungan		100 %		1 paket		N/A		N/A		N/A		N/A			
				Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan Tahap II		100 %		1 paket		N/A		N/A		N/A		N/A			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.04 .1.01.0 6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Optimalisasi TPS 3R di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (10 lokasi)		100 %	0	N/A	500.000.000	10 lokasi	0	N/A	500.000.000	N/A	1.000.000.000	N/A	2.000,000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, dan Kab. Bantul
				Kajian Penyelenggaraan TPS 3R di Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, dan Kab. Bantul		100 %		1 dokumen		0		0		0		1 dokumen			
				Pembangunan TPS3R di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (2 lokasi)		100 %		N/A		N/A		N/A		2 lokasi		2 lokasi			
		1.03.04 .1.01.0 8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		100 %	0	0	0	30 kelompok	100.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30 kelompok	160.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34,73 %	34,72 %	6.712,555,450	35,39%	17.791,275,450	36,05%	14.410,402,995	36,72%	12.701,443,295	37,39%	13.071,587,624	37,39%	57.974,709,364	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	100 %	100 %	6.712,555,450	100 %	17.791,275,450	100 %	14.410,402,995	100 %	12.701,443,295	100 %	13.071,587,624	100 %	57.974,709,364	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.05 1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Kajian Komprehensif Penanganan Permasalahan Jaringan Saluran Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta	0	100 %	0	1 Dokumen	10.600,000,000	0	6.500,000,000	0	4.000,000,000	0	3.500,000,000	1 Dokumen	24.600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Normalisasi Jaringan Air Limbah Kawasan RSUP Dr. Sardjito 500 m	0	100 %		500 m		0		0		0		500 m			
				Pemeliharaan Pagar IPAL Sewon	175 m	100 %		350 m		0		0		0		350 m			
				Penyusunan Dokumen AMDAL IPAL Sewon	0	100 %		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			
				Pembangunan Jaringan Lateral IPAL Sewon	0	100 %		0		1 Paket		1 Paket		1 paket		3 Paket			
				Perencanaan Penataan Kawasan IPAL Sewon	0	100 %		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Rehabilitasi Jaringan Air Limbah	3 paket	100 %		0		2 Paket (Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Kawasaan Kampus UGM dan Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Kawasaan Imogiri Barat)		1 Paket (Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Kawasaan XT Square)		2 Paket (Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Kawasaan Krapyak Wetan dan Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Kotabaru)		5 Paket			
				Optimalisasi IPLT	1 Unit Instalasi IPLT	100 %		1 unit		0		0		0		1 unit			
				Penyusunan DED pembangunan jaringan lateral IPAL Sewon Zona I	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			
		1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	100 %	6,712,555,450	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	7,191,275,450	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	7,910,402,995	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	8,701,443,295	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	9,571,587,624	Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL Sewon sepanjang 2 km	33,374,709,364	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr	100 %		Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr		Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr		Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr		Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr		Kualitas Air dari Outlet IPLT dengan BOD max 75 mg/ltr			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km	100 %		Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km		Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km		Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km		Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km		Pemeliharaan Jaringan Air Limbah sepanjang 324 km				
				Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pemeliharaan IPAL 70 unit	100 %		Pemeliharaan IPAL 70 unit		Pemeliharaan IPAL 70 unit		Pemeliharaan IPAL 70 unit		Pemeliharaan IPAL 70 unit		Pemeliharaan IPAL 70 unit				
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml	100 %		Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml		Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml		Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml		Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml		Kualitas Air Tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml				
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm	100 %		Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm		Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm		Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm		Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm		Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm				
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	100 %		Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr		Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr		Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr		Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr		Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	Dengan standar PH berkisar 6-9	100 %		Dengan standar PH berkisar 6-9		Dengan standar PH berkisar 6-9		Dengan standar PH berkisar 6-9		Dengan standar PH berkisar 6-9		Dengan standar PH berkisar 6-9			
				Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3	100 %		Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3		Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3		Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3		Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3		Kondisi Unsur Dalam Sludge bebas B3			
				Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	Kualitas Air Limbah Bebas B3	100 %		Kualitas Air Limbah Bebas B3		Kualitas Air Limbah Bebas B3		Kualitas Air Limbah Bebas B3		Kualitas Air Limbah Bebas B3		Kualitas Air Limbah Bebas B3			
				Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT	100 %		Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT		Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT		Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT		Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT		Pemeliharaan 1 Unit Instalasi IPLT			
				Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml	100 %		Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml		Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml		Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml		Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml		Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100 ml			
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan (Ha)	3,07 Ha	3,07 Ha	0	3,83 Ha	38,600,000,000	4,59 Ha	10,900,000,000	5,35 Ha	10,900,000,000	6,11 Ha	10,700,000,000	6,11 Ha	71,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.06 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani		3,07 ha	0	3,83 ha	38,600,000,000	4,59 ha	10,900,000,000	5,35 ha	10,900,000,000	6,11 ha	10,700,000,000	6,11 ha	71,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.06 .1.01.0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Detail Engineering Design Saluran Drainase di Jogokaryan, Kel. Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron		3,07 ha	0	0 dokumen	300,000,000	1 dokumen	600,000,000	0 dokumen	300,000,000	0 dokumen	0	1 dokumen	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta
				Detail Engineering Design Saluran Drainase di Jogokaryan, Mantrijeron, ke arah Jl Parangtritis		3,07 ha		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Saluran Drainase Jalan menuju Kandang Menjangan (Krapyak)		3,07 ha		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Saluran Drainase di Prawiroitaman		3,07 ha		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		1.03.06 .1.01.0 5	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Pembangunan Saluran Drainase di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul (Tahap 2)		3,07 ha	0	1 unit	38,000,000,000	0 unit	10,000,000,000	0 unit	10,000,000,000	0 unit	10,000,000,000	1 unit	68,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantu l. Kota Yogyakarta

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Kulur		3,07 ha		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Saluran Drainase di Jogokaryan, Kel. Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron		3,07 ha		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center		3,07 ha		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Saluran Drainase di Jalan menuju Kandang Menjangan (Krapyak)		3,07 ha		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Saluran Drainase di Jogokaryam, Mantrijeron, ke arah Jl Parangtritis		3,07 ha		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit			
		1.03.06 .1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pemeliharaan Saluran Drainase di Jogokaryan, Kel. Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron		3,07 ha	0	0 unit	300,000,000	0 unit	300,000,000	0 unit	600,000,000	1 unit	700,000,000	1 unit	1,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemeliharaan Saluran Drainase di Kawasan Jogja Expo Center		3,07 ha		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Saluran Drainase di Jalan menuju Kandang Menjangan (Krapyak)		3,07 ha		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit		1 unit			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul		3,07 ha		2 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Saluran Drainase di Kawasan Kulur		3,07 ha		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
	3 Penyediaan infrastruktur sumber daya air			Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	85,74 %	46,38 %		70,53%		80,19%		89,86%		100%		100%			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	546,51 liter/detik	566,01 liter/detik	0	576,01 liter/detik	76,873,130,000	584,01 liter/detik	86,801,920,000	590,51 liter/detik	70,876,505,000	598,51 liter/detik	73,699,020,000	598,51 liter/detik	308,250,575,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	9,47 %	10,99 %		12,51%		21,46%		35,04%		44,91%		44,91%			
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	N/A	566,01 liter/detik	0	576,01 liter/detik	26,460,000,000	584,01 liter/detik	41,242,500,000	590,51 liter/detik	35,952,375,000	598,51 liter/detik	36,506,500,000	598,51 liter/detik	140,161,375,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.03.02 .1.01.0 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Detail Engineering Design Pembangunan Long Storage Plelen, Sidomulyo		566,01 liter/detik	0	0 dokumen	1,250,000,000	1 dokumen	1,100,000,000	0 dokumen	200,000,000	0 dokumen	100,000,000	1 dokumen	2,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				DED Bangunan Penampung Air di Tosari, Kalibawang, Kulonprogo		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Plembengan		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Review DED Long Storage Ngentak, Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan, Kab. Kulon Progo		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Samigaluh		566,01 liter/detik		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Jurangjero		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Tegaltirto		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Feasibility Study Embung Siwalan		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Pembangunan Long Storage Kaliurang, Dlingo		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Banaran		566,01 liter/detik		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Review DED Embung Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Bogasari		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				DED Bangunan Penampung Air di Beji, Dusun Tekik, Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kab. Bantul		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Pembangunan Embung Triwidadi		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Gateb		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Kalibuko		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Feasibility Study Embung Jelok		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Temuwuh		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Plampang		566,01 liter/detik		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Blubuk		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Embung Mamendak		566,01 liter/detik		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Survei Investigasi Desain (SID) Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Bantul		566,01 liter/detik	0	1 dokumen	1,350,000,000	1 dokumen	1,100,000,000	1 dokumen	1,300,000,000	1 dokumen	1,400,000,000	4 dokumen	5,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Survei Investigasi Desain (SID) Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Sleman		566,01 liter/detik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Updating Aknop Embung		566,01 liter/detik		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Survei Investigasi Desain (SID) Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Gunung Kidul		566,01 liter/detik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Survei Investigasi Desain (SID) Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo		566,01 liter/detik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Long Storage Ngentak		566,01 liter/detik	0	0 unit	0	1 unit	7,000,000,000	0 unit	9,500,000,000	0 unit	13,200,000,000	1 unit	29,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pembangunan Embung Srunggo		566,01 liter/detik		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit			
				Pembangunan Embung Ngreco		566,01 liter/detik		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit			
				Pembangunan Long Storage Hargomulyo		566,01 liter/detik		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit			
		1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman		566,01 liter/detik	0	4 titik	10,900,000,000	0 titik	10,375,000,000	0 titik	10,228,000,000	0 titik	10,406,500,000	4 titik	41,909,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Kulon Progo		566,01 liter/detik		4 titik		3 titik		0 titik		0 titik		7 titik			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Gunungkidul		566.01 liter/de tik		8 titik		4 titik		4 titik		4 titik		20 titik				
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Bantul		566.01 liter/de tik		4 titik		6 titik		6 titik		6 titik		22 titik				
		1.03.02 .1.01.2 1	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung Samigaluh		566.01 liter/de tik	0	0 unit	4,500,000,000	0 unit	13,000,000,000	0 unit	6,000,000,000	1 unit	2,000,000,000	1 unit	25,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
				Rehabilitasi Embung Plampang		566.01 liter/de tik		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit		2 unit				
				Rehabilitasi Embung Plembengan		566.01 liter/de tik		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit				
				Rehabilitasi Embung Tegaltirto		566.01 liter/de tik		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit				
				Rehabilitasi Embung Jurangjero		566.01 liter/de tik		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit				
				Rehabilitasi Embung Bogasari		566.01 liter/de tik		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit				
				Rehabilitasi Embung Gateb		566.01 liter/de tik		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit				
				Rehabilitasi Embung Kalibuko		566.01 liter/de tik		1 unit		1 unit		0 unit		0 unit		2 unit				
				Rehabilitasi Embung Blubuk		566.01 liter/de tik		1 unit		1 unit		0 unit		0 unit		2 unit				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Rehabilitasi Embung Pakembinangun		566,01 liter/detik		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Rehabilitasi Embung Mamendak		566,01 liter/detik		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Rehabilitasi Embung Temuwuh		566,01 liter/detik		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit			
				Rehabilitasi Embung Jetis Suruh		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
		1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pemeliharaan Berkala Embung Bogasari		566,01 liter/detik	0	1 unit	4,950,000,000	0 unit	4,937,500,000	0 unit	4,934,375,000	0 unit	5,540,000,000	1 unit	20,361,875,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemeliharaan Berkala Embung Temuwuh		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga		566,01 liter/detik		25 unit		25 unit		27 unit		28 unit		28 unit			
				Pemeliharaan Berkala Embung Jolosutro		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Berkala Embung Kaliaji		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Berkala Embung Mamendak		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga		566,01 liter/detik		0 unit		5 unit		4 unit		6 unit		15 unit			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemeliharaan Berkala Embung Gateb		566,01 liter/detik		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga		566,01 liter/detik		25 unit		25 unit		27 unit		28 unit		28 unit			
		1.03.02.1.01.6.0	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi		566,01 liter/detik	0	1 dokumen	2,120,000,000	1 dokumen	2,190,000,000	1 dokumen	2,250,000,000	1 dokumen	2,320,000,000	4 dokumen	8,880,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA		566,01 liter/detik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		1.03.02.1.01.6.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi		566,01 liter/detik	0	1 lembaga	1,350,000,000	1 lembaga	1,500,000,000	1 lembaga	1,500,000,000	1 lembaga	1,500,000,000	1 lembaga	5,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air		566,01 liter/detik		2 event (48 lembaga)		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga			
				Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA		566,01 liter/detik		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga			
		1.03.02.1.01.6.2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY		566,01 liter/detik	0	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	4 dokumen	160,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	N/A	10,99 %	0	12,51%	50,413,130,000	21,46%	45.559,420,000	35,04%	34.924,130,000	44,91%	37.192,520,000	44,91%	168,089,200,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Detail Engineering Design Rehabilitasi Bendung Sidomulyo		10,99 %	0	1 dokumen	1,700,000,000	0 dokumen	1,000,000,000	0 dokumen	1,000,000,000	0 dokumen	1,000,000,000	1 dokumen	4,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Kajian Tunel DI Pijenan/Kamijoro		10,99 %		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Updating Database e-PAKSI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi		10,99 %		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Detail Engineering Design Rehabilitasi Bendung Engkuk-engkuan		10,99 %		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sidomulyo		10,99 %	0	0 km	20,000,000,000	0 km	9,000,000,000	0,666 km	9,000,000,000	0 km	13,000,000,000	0,666 km	51,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Samben		10,99 %		0,166 km		0 km		0,333 km		0 km		0,499 km			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glendongan		10,99 %		0,666 km		0,666 km		0 km		0 km		1,332 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Blawong 2		10,99 %		0,666 km		1,00 km		0 km		0 km		1,666 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mrican		10,99 %		0 km		0,666 km		0 km		0 km		0,666 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tirtorejo/Grembyangan		10,99 %		0 km		0 km		0 km		1,00 km		1,00 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kucir		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sapon		10,99 %		1,00 km		0 km		0 km		1,00 km		2,00 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ngebruk		10,99 %		0 km		0 km		0,333 km		0 km		0,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Timoho		10,99 %		0,166 km		0 km		0 km		0,333 km		0,499 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Simo		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		1,00 km		1,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ponggok		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		0 km		0,333 km			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gamping		10,99 %		0 km		0 km		0 km		1,00 km		1,00 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Klampok		10,99 %		0 km		0,666 km		0 km		0 km		0,666 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Madean		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro		10,99 %		0,333 km		0 km		1,00 km		0 km		0,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bangeran		10,99 %		0 km		0 km		0,666 km		0 km		0,666 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Prangkok		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pendowo		10,99 %		1,00 km		0 km		0 km		0 km		1,00 km			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman		10,99 %		1,00 km		0 km		0 km		0 km		1,00 km			
		1.03.02 .1.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Sentonorejo		10,99 %	0	0 bendung	0	1 bendung	5.000,000,000	0 bendung	0	0 bendung	0	1 bendung	5.000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.03.02 1.02.1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gamping		10,99 %	0	0 km	5,000,00 0,000	0 km	8,500,0 00,000	0,666 km	7,500,0 00,000	0 km	5,500,0 00,000	0,666 km	26,500,0 00,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Blawong		10,99 %		0 km		0 km		0 km		0 km		0,666 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sidomulyo		10,99 %		0 km		0 km		0,333 km		0 km		0,333 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman		10,99 %		0 km		0,666 km		0 km		0 km		0,666 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mrican		10,99 %		0 km		0 km		0 km		0,333 km		0,333 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Trini		10,99 %		0 km		0,333 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pendowo		10,99 %		0,333 km		0 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Simo		10,99 %		0 km		0 km		0,666 km		0 km		0,666 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan		10,99 %		0,333 km		1,000 km		0,333 km		0,333 km		1,999 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Dadapan		10,99 %		0 km		0 km		0 km		0,666 km		0,666 km			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kanoman		10,99 %		0 km		0,333 km		0 km		0 km		0,333 km			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sapon		10,99 %		1,000 km		0,500 km		0,500 km		0,500 km		2,500 km			
		1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Sidomulyo		10,99 %	0	0 bendung	0	1 bendung	5,500,000,000	0 bendung	0	0 bendung	0	1 bendung	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Rehabilitasi Bendung Engkuk-engkukan		10,99 %		0 bendung		1 bendung		0 bendung		0 bendung		1 bendung			
		1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Pulodadi		10,99 %	0	0,200 km	17,850,000,000	0 km	14,710,500,000	0 km	15,435,000,000	0 km	15,705,000,000	0,200 km	63,700,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km			
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Klampok		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km			
				Belanja Modal Genset dan Pompa		10,99 %		1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit			
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Nologaten		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Kanoman		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi		10,99 %		1,800 km		1,800 km		1,800 km		1,800 km		7,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Kuton		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Tanjung		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Sumur Pompa		10,99 %		0,200 km		0,200 km		0,300 km		0,300 km		1,000 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Sembuh		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Dadapan		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Gamping		10,99 %		0,200 km		0 km		0 km		0 km		0,200 km				
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km		511,77 km				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.03.02 .1.02.2 2	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %	0	41 bendung	5,263,130,000	41 bendung	1,188,920,000	41 bendung	1,263,130,000	41 bendung	1,188,920,000	41 bendung	8,904,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemeliharaan Berkala Bendung		10,99 %		41 bendung		41 bendung		41 bendung		41 bendung		41 bendung			
				Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %		41 bendung		41 bendung		41 bendung		41 bendung		41 bendung			
		1.03.02 .1.02.2 8	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY		10,99 %	0	41 DI	600,000,000	41 DI	660,000,000	41 DI	726,000,000	41 DI	798,600,000	41 DI	2,784,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	4 Peningkatan aksesibilitas Jalan			Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	98,87 %	97,24 %		97,80%		98,76%		99,22%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan	70,52%	68,01 %	40,065,453,650	68,61%	283,422,249,068	69,21%	244,535,178,000	69,81%	245,337,380,467	70,41%	239,790,012,547	70,41%	1,013,084,820,082	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.10 .1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	70,52 %	68,01 %	40,065,453,650	68,61%	283,422,249,068	69,21%	244,535,178,000	69,81%	245,337,380,467	70,41%	239,790,012,547	70,41%	1,013,084,820,082	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.10 .1.01.0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan	0 dokumen	68,01 %	0	50 dokumen	220.000,000	60 dokumen	33.000,000	70 dokumen	36.300,000	80 dokumen	39.930,000	260 dokumen	329,230,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				DED ruas jalan gading-Playen	0 dokumen	68,01 %		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				DED ruas jalan wonorejo_tambakan	0 dokumen	68,01 %		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		1.03.10 .1.01.0 2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	1. Tahapan penyiapan/bahan IPL Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunung Kidul : 1 Dokumen; 2. Lahan Apraisal Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunung Kidul : 1 Dokumen	68,01 %	0	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelesaian jalan: 1. Appraisal;	404,250,000	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelesaian jalan: 1. Appraisal; 2. Pembayaran Ganti Rugi Tanah	354,250,000	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelesaian jalan: 1. Appraisal; 2. Pembayaran Ganti Rugi Tanah	1,318,559,667	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelesaian jalan: 1. Appraisal; 2. Pembayaran Ganti Rugi Tanah	964,309,667	Terbebaskannya lahan/tanah untuk penyelesaian jalan: 1. Appraisal; 2. Pembayaran Ganti Rugi Tanah	3,041,369,334	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.10 .1.01.0 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS)	1 dokumen	68,01 %	0	1 dokumen	3,000,000,000	1 dokumen	3,000,000,000	1 dokumen	3,000,000,000	1 dokumen	3,000,000,000	5 dokumen	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS)	1 dokumen	68,01 %		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		1.03.10 .1.01.0 6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan Ruas Hargomulyowatugajah	0 km	68,01 %	16,804,365,100	2 km	206,732,895,518	0 km	130,752,000,000	0 km	135,360,000,000	0 km	128,736,000,000	2 km	601,580,895,518	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Jalan Ruas Yogyakarta – Kebonagung	0 km	68,01 %		2 km		0 km		0 km		0 km		2 km			
				Jalan ruas Karangmojo semin	0 km	68,01 %		1 km		0 km		0 km		0 km		1 km			
				Jalan ruas Brosot – Toyan	2 km	68,01 %		3 km		0 km		0 km		0 km		3 km			
				Jalan ruas Srandakan - Poncosari	0 km	68,01 %		4 km		0 km		0 km		0 km		4 km			
				Jalan Ruas Deggung wonorejo	1 km	68,01 %		0,5 km		0 km		0 km		0 km		0,5 km			
				Pembangunan jalur penyelamatan dan kolam penyelamatan di Imogiri Mangunan	0 paket	68,01 %		1 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket			
				Jalan ruas gading – playen	0 km	68,01 %		2,25 km		0 km		0 km		0 km		2,25 km			
				Jalan ruas Tegalsari – Klepu	0 km	68,01 %		4 km		0 km		0 km		0 km		4 km			
				Jalan ruas Klangan – tempel	0 km	68,01 %		2 km		0 km		0 km		0 km		2 km			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
				Jalan ruas Patuk – Terong	0 km	68,01 %		4 km		0 km		0 km		0 km		4 km				
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jalan ruas karangmojo – semin	0 km	68,01 %	0	1 km	30,000,000,000	0 km	54,480,000,000	0 km	56,400,000,000	0 km	53,640,000,000	1 km	194,520,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
				Jalan ruas Yogyakarta-kebonagung 1	0 km	68,01 %		1 km		0 km		0 km		0 km		1 km				
				Jalan ruas Sentolo – Brosot	0 km	68,01 %		2 km		0 km		0 km		0 km		2 km				
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan provinsi	563,81 Km	68,01 %	21,113,985,000	760,45 Km	30,418,000,000	760,45 Km	33,459,800,000	760,45 Km	36,805,780,000	Pemeliharaan rutin jalan: 1. Terpeliharanya jalan provinsi sepanjang 760,45 Km, 2. Pensertifikatan tanah jalan provinsi (2 ruas)	40,486,358,000	Pemeliharaan rutin jalan: 1. Terpeliharanya jalan provinsi sepanjang 760,45 Km, 2. Pensertifikatan tanah jalan provinsi (2 ruas)	141,169,938,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Jembatan Jlatan	0	68,01 %	0	3,5 m	10,500,000,000	0	7,350,000,000	0	7,350,000,000	0	7,350,000,000	3,5 m	32,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
				Jembatan Tejogan	0	68,01 %		3,5 m		0		0		0		3,5 m				
				Jembatan Secang	0	68,01 %		3,5 m		0		0		0		3,5 m				
				Jembatan Pulokadang	0	68,01 %		10,5 m		0		0		0		10,5 m				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		1.03.10 .1.01.1 7	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya pelebaran jembatan	0	68,01 %	0	0	0	0	10.500,000,000	Pelebaran jembatan dengan panjang 30 meter	0	0	0	0	10.500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.10 .1.01.1 9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya jembatan provinsi	4166,06 m	68,01 %	2,147,103,550	5757,66 m	2,147,103,550	5757,66 m	4,606,128,000	5757,66 m	5,066,740,800	5757,66 m	5,573,414,880	5757,66 m	17,393,387,230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	3,275 km	3,40 Km	139,048,950,000	2,83 Km	325,019,887,000	0	324,275,000,000	0	375,600,000,000	0	215,700,000,000	6,23 Km	1,240,594,887,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
				Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	53.709 m2	41.183 m2		83.101,34 m2	0		0	40.000 m2		42.064,38 m2		206.348,72 m2				
				Terlaksananya peningkatan jalan	1,65 km	0		10,52 Km	19,00 Km			15,70 Km		7,00 Km		52,22 Km				
				Terlaksananya pembangunan jembatan	0	0		12 meter	0		0	0		0		12 meter				
				Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JLS	0	0		1060 buah	0		0	0		0		1060 buah				
				Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	1 dokumen	0		1 dokumen	2 dokumen			2 dokumen		2 dokumen		7 dokumen				
				Terlaksananya rehabilitasi jalan	0	0		0	0		0	4,0 Km		0		4,0 Km				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyediaan air bersih dari air tanah dalam		16 titik	139,048,950,000	30 titik	325,019,887,000	6 titik	324,275,000,000	2 titik	375,600,000,000	0 titik	215,700,000,000	38 titik	1,240,594,887,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Penambahan jaringan jalan baru		5,275 Km	3,40 Km		2,83 Km		0		0		0		6,23 Km			
			Pengadaan tanah untuk penyelenggaraa n		236708 m2	41183 m2		83101,34 m2		0		40000 m2		42064,38 m2		206348,72 m2			
			Peningkatan jalan		13,9 Km	0		10,52 Km		19,00 Km		15,70 Km		7,00 Km		52,22 Km			
			Pembangunan jembatan		0	0		12 meter		0		0		0		12 meter			
			Pemasangan patok aset tanah JLS		2062 buah	0		1060 buah		0		0		0		1060 buah			
			Penggantian jalan		0	0		0		2,2 Km		0		0		2,2 Km			
			Proses tahapan pengadaan tanah		10 dokumen	0		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 dokumen			
			Rehabilitasi jalan		4,63 Km	0		0		0		4,00 Km		0		4,00 Km			
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol		0	1,378.080,000	1 Tahun	55,457.500,000	1 Tahun	150,000,000,000	1 Tahun	150,000,000,000	1 Tahun	50,000,000,000	1 Tahun	405,457,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta
			Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak			0		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Penyusunan DED . Interior dan Rencana Content Jogja Planning Gallery		0		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			
				Pemasangan Content Interior dan Eksterior (Zona A dan Zona B Interior & Eksterior)		0		0		0		0		1 Paket		1 Paket			
				Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) di Jogja Planning Gallery		0		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			
				Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra		0		1039 m2		-		-		-		-			
				Review Dokumen Masterplan dan DED Penataan Kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak		0		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen			
				Pekerjaan Fisik Pembangunan Akses penghubung tempat parkir Beskalan-Indra		0		0		0		0		0		0			
				Pembangunan Konstruksi JPG (Zona A dan Zona B)		0		0		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery		0		2 Dokumen		0		0		0		2 Dokumen			
				Pembangunan Lansekap (Zona A dan Zona B Lansekap)		0		0		0		0		1 Paket		1 Paket			
				Pembebasan Lahan Jogja Planning Gallery		0		1500 m2		0		0		0		1500 m2			
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Penanganan RTLH dengan Arsitektur Yogyakarta		0	47,188,394,000	60 rumah	24,662,884,000	-	900,000,000	-	146,300,000,000	-	118,300,000,000	-	290,162,884,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Proses Penserifikatan JJLS di Kulon Progo	Terbayarnya SPS Tanah JJLS di Kulon Progo	0		Terbayarnya SPS Tanah JJLS di Kulon Progo		-		-		-		-			
				Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul	Terpasangnya patok aset tanah JJLS di Gunungkidul (527 buah patok)	0		Terpasangnya patok aset tanah JJLS di Gunungkidul (400 buah patok)		-		-		-		-			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pengamanan Aset Tanah JJLS di Bantul	-	0		Terpasangnya patok aset tanah JJLS di Bantul (100 buah patok)		-		-		-		-				
				Pelaksanaan Pengadaan Tanah JJLS Simpang Bundaran Planjan (Segmen Planjan - Kemandang)	Terwujudnya Dokumen IPL Pengadaan Tanah JJLS Simpang Bundaran Planjan	0		Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS Simpang Bundaran Planjan (Segmen Planjan - Kemandang)		-		-		-		-				
				Pelaksanaan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah kembali JJLS Segmen Ngremang - Congot (Luasan 86,209m2)	-	0		Terlaksananya tahap persiapan pengadaan tanah kembali JJLS Segmen Ngremang - Congot (luasan 86,209 m2)		-		-		-		-				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pengamanan Aset Tanah JJLS di Kulon Progo	Terpasangnya patok aset tanah JJLS di Kulon Progo (513 buah patok)	0		Terpasangnya patok aset tanah JJLS di Kulon Progo (250 buah patok)		-		-		-		-				
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 (1,85 km)	-	0	86.214.272,000	1,85 km	173.393.071,000	-	124,175,000,000	-	34.300.000,000	-	24.000.000,000	-	355,868.071,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Gunungkidul	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis karst gunung sewu	Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen V (1.375 km); Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen I (1,90 Km)	0		-		Terlaksananya: 1. Peningkatan Ruas Jalan Playen - Paliyan (3,00 Km); 2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah (2,20 Km); 3. Peningkatan Jalan Ruas Patuk - Terong (4,00 Km)			Terlaksananya Peningkatan Ruas Jalan Wonosari - Mulo (4,90 Km)		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Ruas Mulo - Baron (4,00 Km)		Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis karst gunung sewu			
				Peningkatan Ruas Jalan Gading - Playen (2,25 km)	-	0		2,25 km		-			-		-					

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Gunungkidul (Tahap 1)		0		7 titik sumur bor dan 70 titik sumur resapan		-		-		-		-				
				Survey Eksplorasi Detail Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Gunungkidul		0		1 paket dokumen SED		-		-		-		-				
				Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 3 (0,98 km)	-	0		0,98 km		-		-		-		-				
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Alr Tanah Di Kabupaten Gunungkidul		0		0 titik		2 titik		4 titik		5 titik		26 titik				
				Pembebasan Tanah Akses Kawasan Pendukung Karst Gunung Sewu di ruas Hargomulyo - Watugajah	-	0		luas 56.689,34 m2 untuk panjang jalan 2,20 Km		-		-		-		-				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Gunungkidul (Tahap 2)		0		8 titik sumur bor dan 80 titik sumur resapan		-		-		-		-				
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Alr Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (Tahap 1)		0	2,376.626,000	0 titik	15,819,124,000	4 titik	2,200,000,000	2 titik	1,100,000,000	4 titik	2,200,000,000	20 titik	21,319,124,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Kulon Progo	
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (Tahap 3)		0		4 titik sumur bor dan 40 titik sumur resapan		-		-		-		-				
				Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari - Klepu	0	0		0		4,00 Km		0		0		4,00 Km				
				Pembangunan Jembatan Tejogan	0	0		3 meter		-		-		-		3 meter				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (Tahap 2)		0		6 titik sumur bor dan 60 titik sumur resapan		-		-		-		-				
				Peningkatan Jalan Ruas Sermo - Klepu (1,27 km)	1,00 km	0		1,27 km		-		-		-		2,27 km				
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Bantul		0	1.891,578,000	0 titik	0	0 titik	0	0 titik	14.000,000,000	0 titik	0	0 titik	14.000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Peningkatan jalan ruas Dawung - Makam Imogiri (1,65 Km)	0		0		0		Peningkatan jalan ruas Imogiri-Dodogaran (2,00 Km)	0		0					
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis candi prambanan - candi ijo	-	0	0	-	0	-	0	Proses tahapan pembebasan tanah JORR Segmen Kalasan - Bokoharjo	1.900,000,000	Proses tahapan pembebasan tanah JORR Segmen Kalasan - Bokoharjo	200.000,000	Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis candi prambanan - candi ijo	2.100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Alr Tanah Di Kabupaten Sleman		0		0 titik		0 titik		3 titik		0 titik		3 titik			
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Pengelolaan Bangunan Edukasi dan RTH di Embung Langensari		0	0	1 Tahun	350,000,000	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta
				Rehabilitasi Gedung Edukasi dan RTH di Embung Langensari		0		1 Paket		0		1 Paket		0		1 Paket			
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis merapi	-	0	0	-	0	Terlaksananya peningkatan jalan ruas Yogyakarta - Kaliuran (4,00 Km)	28,000,000,000	Terlaksananya peningkatan jalan ruas Yogyakarta - Kaliuran (4,00 Km)	28,000,000,000	-	0	Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis merapi	56,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (Tahap 2)		0	0	5 titik	20,537,308,000	0 titik	14,000,000,000	0 titik	0	0 titik	21,000,000,000	5 titik	55,537,308,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Kulon Progo

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kiskendo - Sermo - Wates	-	0		Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Sentolo - Pengasih (2,55 Km)		Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Sentolo - Pengasih (2,00 Km)		-		Terlaksananya Peningkatan Jalan Ruas Pengasih - Sermo (3,00 Km)		Terlaksananya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kiskendo - Sermo - Wates			
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Pembangunan VIP Room Bandara Baru Kulon Progo Lanjutan		0	0	4.155 m2 (Arsitektur, Struktur dan MEP)	34,800,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	4.155 m2 (Arsitektur, Struktur dan MEP)	39,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kulon Progo
				Pembangunan Interior VIP Room Bandara Baru Kulon Progo		0		0		1 Paket		0		0		1 Paket			
	5		Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	98,82 %	99,57 %		57,12%		71,41%		85,71%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	100 %	100 %	0	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	4,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.08 .1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	N/A	N/A	0	1 Dokumen	900.000,000	1 Dokumen	1.000,000,000	1 Dokumen	1.100,000,000	1 Dokumen	1.200,000,000	1 Dokumen	4.200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	N/A	N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		1.03.08 .1.01.0 1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	penyusunan dokumen identifikasi bangunan gedung milik daerah provinsi sesuai regulasi		N/A	0	1 Dokumen	300.000,000	1 Dokumen	350.000,000	1 Dokumen	400.000,000	1 Dokumen	450.000,000	1 Dokumen	1.500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.08 .1.01.0 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung		N/A	0	4 Kabupaten, 1 Kota	600.000,000	4 Kabupaten, 1 Kota	650.000,000	4 Kabupaten, 1 Kota	700.000,000	4 Kabupaten, 1 Kota	750.000,000	4 Kabupaten, 1 Kota	2.700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara		N/A		1 Dokumen / 25 Laporan		1 Dokumen / 25 Laporan		1 Dokumen / 25 Laporan		1 Dokumen / 25 Laporan		1 Dokumen / 25 Laporan			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara		N/A		1 Dokumen / 100 Rekomendasi		1 Dokumen / 100 Rekomendasi		1 Dokumen / 100 Rekomendasi		1 Dokumen / 100 Rekomendasi		1 Dokumen / 100 Rekomendasi			
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	53,58%	54,25 %	931,500,000	63,48%	7,850,000,000	72,71%	5,067,500,000	81,94%	6,250,000,000	91,17%	5,450,500,000	91,17%	24,618,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	4950 LHU	5995 LHU		800 LHU		800 LHU		800 LHU		800 LHU		9.195 LHU			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi per tahun; dan 2) Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun.	1) 1683 orang; dan 2) 5995 LHU	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	200,000,000	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	6,575,000,000	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	3,792,500,000	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	4,975,000,000	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	4,175,500,000	1) 2383 orang; dan 2) 9195 LHU	19,518,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.11.1.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	0	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	0	0	1 dokumen	200,000,000	0	0	3 dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	0	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	100,000,000	100 orang	300,000,000	100 orang	300,000,000	100 orang	300,000,000	100 orang	300,000,000	400 orang	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.11 .1.01.0 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	1683 orang	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	0	150 orang	225.000,000	150 orang	225.000,000	150 orang	225.000,000	150 orang	225.000,000	2383 orang	900.000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.11 .1.01.0 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pengadaan Unit Alat Pengujian Laboratorium	0	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	0	15 unit	5.700,000,000	10 unit	3.067,500,000	15 unit	4.050,000,000	10 unit	3.450,500,000	50 unit	16.268,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Akreditasi Laboratorium	1 akreditasi	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		1 akreditasi		1 akreditasi		1 akreditasi		1 akreditasi		1 akreditasi			
				Pemeliharaan Alat Laboratorium	10 jenis	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		15 jenis		25 jenis		30 jenis		35 jenis		35 jenis			
				Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium	0	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		1 aplikasi SIM-LAB		0		0		0		1 aplikasi SIM-LAB			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	5195 orang	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		800 orang		800 orang		800 orang		800 orang		9195 orang			
				Jumlah Parameter Pengujian (Ruang Lingkup) Terakreditasi	24 Parameter	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		0		26 Parameter		0		28 Parameter		28 Parameter			
				Kalibrasi Alat Laboratorium	43 jenis	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		25 jenis		40 jenis		45 jenis		50 jenis		50 jenis			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium	100 jenis	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		100 jenis		125 jenis		125 jenis		150 jenis		150 jenis				
		1.03.11.1.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	0	1) 150 orang; dan 2) 800 LHU	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	4 dokumen	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.	1) 1 laporan; dan 2) 501.715 orang	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	731,500,000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1,275,000,000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1,275,000,000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1,275,000,000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1,275,000,000	1) 5 laporan; dan 2) 686.726 orang	5,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 laporan	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	50,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	5 laporan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 dokumen	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	681,500,000	1 dokumen	1,175,000,000	1 dokumen	1,175,000,000	1 dokumen	1,175,000,000	1 dokumen	1,175,000,000	5 dokumen	4,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
	B	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
	6 Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau			Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	97,75 %	95,65 %		96,12%		96,59%		97,05%		97,53%		97,53%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	0	0	399,700,000	100 %	3,820,000,000	100 %	5,295,000,000	100 %	3,220,000,000	100 %	2,570,000,000	100 %	14,905,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	399,700,000	8 Dokumen	2,500,000,000	9 Dokumen	3,650,000,000	7 Dokumen	1,250,000,000	3 Dokumen	600,000,000	27 Dokumen Pendataan	8,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen Pendataan perumahan yang terkena relokasi program pemerintah	N/A	N/A	0	1 Dokumen Pendataan perumahan yang terkena relokasi program pemerintah di : a. KRB Merapi, Kabupaten Sleman; b. KSN Prambanan, c. SRS Makam	1,300,000,000	1 Dokumen Pendataan perumahan yang terkena relokasi program pemerintah di : a. SRS Karst Gunung Sewu - Lintas Bantul, Gunung Kidul; b. SRS Menore	2,200,000,000	-	500,000,000	-	0	2 Dokumen Pendataan dan Peta	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								Imogiri, Kabupaten Bantul		h; c. Kawas an Perkota an Yogyakarta										
				Dokumen Pendataan Perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	N/A	N/A		1 Dokumen Pendataan Perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman di Kab. Sleman		1 Dokumen Pendataan Perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten Kulonpr ogo; b. Kota Yogyakarta dan c. Kabupaten Bantul		1 Dokumen Pendataan Perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman di Kab. Gunung kidul		-		3 Dokumen Pendataan dan Peta				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Dokumen Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	N/A	N/A		1 Dokumen Pendataan perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya di Kabupaten Sleman		1 Dokumen Pendataan perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya di: a. kabupaten Kulonprogo; b. Kota Yogyakarta dan c. Kabupaten Bantul		1 Dokumen Pendataan perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya di Kabupaten Gunungkidul		-		3 Dokumen Pendataan dan Peta				
				Dokumen Pendataan perumahan di lokasi bantaran sungai sebagai pencegahan kawasan kumuh	N/A	N/A		1 Dokumen Pendataan perumahan di lokasi bantaran sungai sebagai pencegahan kawasan kumuh (Lokasi: Kota Yogyakarta)		1 Dokumen Pendataan perumahan di lokasi bantaran sungai sebagai pencegahan kawasan kumuh (Lokasi: Kabupaten Bantul)		1 Dokumen Pendataan perumahan di lokasi bantaran sungai sebagai pencegahan kawasan kumuh (Lokasi: Kabupaten Sleman)		-		3 Dokumen Pendataan dan Peta				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.02 .1.01.0 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen data lahan potensial sebagai data untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	N/A	N/A	0	1 Dokumen Identifikasi lahan potensial untuk relokasi perumahan yang terkena dampak program provinsi (5 Kabupaten/Kota di lokasi perbatasan, KPY, KSN dan SRS)	300,000,000	1 Dokumen Identifikasi lahan potensial untuk relokasi perumahan yang terkena dampak program provinsi (5 Kabupaten/Kota di lokasi perbatasan, KPY, KSN dan SRS)	300,000,000	1 Dokumen Identifikasi lahan potensial untuk relokasi perumahan yang terkena dampak bencana (5 Kabupaten/Kota di lokasi perbatasan, KPY, KSN dan SRS)	350,000,000	1 Dokumen Identifikasi lahan potensial untuk relokasi perumahan yang berada di bantaran sungai (5 Kabupaten/Kota di lokasi perbatasan, KPY, KSN dan SRS)	300,000,000	4 Dokumen dan Peta	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02 .1.01.0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	N/A	N/A	399,700,000	1 Dokumen	500,000,000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di a.Kabupaten Bantul; b. Kabupaten Kulon	750,000,000	-	0	-	0	5 Dokumen dan Peta	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										Progo dan c. Kota Yogyakarta									
		1.04.02 .1.01.0 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen Data Kondisi dan Daya Tampung Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	N/A	N/A	0	1 Dokumen Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kabupaten: a. Bantul, b. Sleman, c. Kota Yogyakarta	300.000.000	1 Dokumen Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kabupaten: a. Gunung Kidul, b. Kulonprogo	300.000.000	1 Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat di Kabupaten: a. Bantul, b. Sleman, c. Kota Yogyakarta	300.000.000	1 Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat di Kabupaten: a. Gunung Kidul, b. Kulonprogo	200.000.000	4 Dokumen Pendataan	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02 .1.01.0 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	N/A	N/A	0	1 Dokumen data jumlah pemilik rumah dalam system informasi perumahan	100.000.000	3 Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100.000.000	4 Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100.000.000	1 Dokumen data jumlah pemilik rumah dalam system informasi perumahan	9 Dokumen data jumlah pemilik rumah dalam system informasi perumahan	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.04.02 .1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	0	20 Unit	1.300,000,000	20 Unit	1.625,000,000	40 Unit	1.950,000,000	40 Unit	1.950,000,000	120 Unit	6.825,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.02 .1.03.0 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	N/A	N/A	0	10 Unit	400,000,000	10 Unit	325,000,000	20 unit	650,000,000	20 unit	650,000,000	60 unit	2,025,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02 .1.03.0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	N/A	N/A	0	10 unit	900,000,000	10 unit	1,300,000,000	20 unit	1,300,000,000	20 unit	1,300,000,000	60 unit	4,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02 .1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	0	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	8 Laporan	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.02 .1.04.0 1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	0	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	4 Laporan Tahunan	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02 .1.04.0 2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen Laporan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	0	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	1 Dokumen Laporan	10,000,000	4 Laporan Tahunan	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan kumuh	0	0	23,069,945,600	25 %	71,470,000,000	50 %	71,900,000,000	75 %	71,550,000,000	100 %	71,950,000,000	100 %	286,870,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Persentase penanganan rumah tidak layak huni	56,12%	53,78 %		58,27%		62,75%		67,24%		71,73%		71,73%			
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	N/A	N/A	299,945,600	1 Dokumen Laporan	170,000,000	2 Dokumen Laporan	550,000,000	1 Dokumen Laporan	200,000,000	2 Dokumen Laporan	550,000,000	6 Dokumen Laporan	1,470,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Kebijakan PKP	N/A	N/A	99,945,600	0	0	1 Review Dokumen RP3KP	350,000,000	0	0	1 Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	350,000,000	2 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.03 .1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	N/A	N/A	200,000,000	1 Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	170,000,000	1 Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	200,000,000	1 Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	200,000,000	1 Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	200,000,000	4 Laporan Tahunan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PKP	770,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.03 .1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luasan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY yang tertangani	N/A	N/A	22,770,000,000	0 Ha	71,300,000,000	10 Ha	71,350,000,000	23 Ha	71,350,000,000	36 Ha	71,400,000,000	36 Ha	285,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	43,10%	53,78 %		58,28 %		62,77 %		67,27 %		71,77%		71,77%			
		1.04.03 .1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	N/A	53,78 %	0	1 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	200,000,000	1 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	250,000,000	1 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	250,000,000	1 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	300,000,000	4 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.03 .1.02.0 3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PK: Gunungkidul ; 1000 unit Kulon Progo: 500 unit Sleman : 200 unit Bantul : 250 unit Kota Yogyakarta : 50 unit PB: Gunungkidul ; 200 unit Kulon Progo: 120 unit Sleman : 80 unit Bantul : 100 unit	PK : 955 unit PB : 98 unit	53,78 %	22.770.000,000	PK : 2000 unit PB : 500 unit	65.000,000,000	PK : 2000 unit PB : 500 unit	65.000.000,000	PK : 2000 unit PB : 500 unit	65.000.000,000	PK : 2000 unit PB : 500 unit	65.000.000,000	PK : 2000 unit PB : 500 unit	260.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.03 .1.02.0 7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	N/A	53,78 %	0	0	6.100,000,000	10 Ha	6.100,000,000	13 Ha	6.100,000,000	13 Ha	6.100,000,000	36 Ha	24.400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Review Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan DIY	N/A	53,78 %		0		1 dokumen Review Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan		1 dokumen Review Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan		1 dokumen Review Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan		3 dokumen Review Perencanaan Penanganan Kws. Kumuh Kewenangan			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
										DIY		DIY		DIY		DIY			
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	278 lokasi	450 lokasi	86,294,700,000	160 Lokasi	32,800,000,000	320 Lokasi	32,750,000,000	480 Lokasi	32,750,000,000	640 Lokasi	32,750,000,000	640 Lokasi	131,050,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman	N/A	N/A	86,294,700,000	160 lokasi	32,800,000,000	160 lokasi	32,750,000,000	160 lokasi	32,750,000,000	160 lokasi	32,750,000,000	640 lokasi	131,050,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen DED PSU Permukiman	1 Dokumen DED PSU	N/A	0	1 Dokumen DED PSU (160 Lokasi)	800,000,000	1 Dokumen DED PSU (160 Lokasi)	750,000,000	1 Dokumen DED PSU (160 Lokasi)	750,000,000	1 Dokumen DED PSU (160 Lokasi)	750,000,000	6 Dokumen DED PSU Permukiman di 240 Lokasi	3,050,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman	N/A	N/A		1 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman (1 kawasan)		1 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman (1 kawasan)		1 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman (1 kawasan)		1 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman (1 kawasan)		4 Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Permukiman (1 kawasan)			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.05 .1.01.0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Peningkatan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung fungsi permukiman	N/A	N/A	86,294,700,000	160 lokasi	32,000,000,000	160 lokasi	32,000,000,000	160 lokasi	32,000,000,000	160 lokasi	32,000,000,000	640 Lokasi	128,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Review DED PSU permukiman	N/A	N/A		0		1 dokumen Review DED PSU Permukiman (160 lokasi)		1 dokumen Review DED PSU Permukiman (160 lokasi)		1 dokumen Review DED PSU Permukiman (160 lokasi)		4 dokumen Review DED PSU Permukiman (160 lokasi)			
	C	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)																	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	0	0	9,250,000,000	50 unit	18,356,459,500	50 unit	26,556,459,500	50 unit	39,056,459,500	50 unit	26,056,459,500	200 unit	110,025,838,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Peningkatan saluran irigasi tersier		6 km	3,250,000,000	9 km	3,300,000,000	10 km	3,250,000,000	10 km	3,250,000,000	10 km	3,250,000,000	39 km	13,050,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	N/A	40 unit		50 unit		50 unit		50 unit		50 unit		240 unit				
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	BKK Arsitektur Khas Yogyakarta (RTLH)	N/A	40 unit	3.250,000,000	6 Kelurahan	3,300,000,000	-	3,250,000,000	-	3,250,000,000	-	3,250,000,000	-	13,050,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta di DIY	N/A	40 unit		0		50 unit		50 unit		50 unit		200 unit				
				Kajian Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pringgolayan, Kotagede	N/A	40 unit		1 Dokumen		-		-		-		-				
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		1 laporan	6,000,000,000	1 laporan	15,056,459,500	1 laporan	23,306,459,500	1 laporan	35,806,459,500	1 laporan	22,806,459,500	4 laporan	96,975,838,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kajian Survey Eksplorasi Desain (SED) Sumur Bor desa Plembutan untuk Pertanian		1 laporan	6,000,000,000	3 Lokasi	10,706,459,500	0 dokumen	22,306,459,500	0 dokumen	34,806,459,500	0 dokumen	22,806,459,500	1 dokumen	89,625,838,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pembangunan Bangunan Penampung Air di Beji, Dusun Tekik, Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kab. Bantul		1 laporan		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Long Storage Plelen, Sidomulyo		1 laporan		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier		1 laporan		60 Lokasi		10 km		10 km		10 km		39 km			
				pengadaan tanah dan pembangunan reservoir embung ngreco baku penyangga SRS Karst Gunung Sewu		1 laporan		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Kajian Pengembangan Embung Watusigar Gunungkidul		1 laporan		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
				Pembangunan Embung Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul		1 laporan		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				pengadaan tanah dan pembangunan reservoir long storage ngentak penyangga SRS Menoreh		1 laporan		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pembangunan Bangunan Penampung Air di Tosari, Kalibawang, Kulonprogo		1 laporan		0 unit		1 unit		0 unit		0 unit		1 unit			
				Pembangunan Long Storage Kaliurang, Dlingo		1 laporan		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		1 unit			
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Irigasi		1 laporan		1 dokumen		0		0		0		1 dokumen			
				Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian		1 laporan		5 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen			
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Updating One Map Irigasi		1 laporan	0	1 laporan	1,350,000,000	1 laporan	1,000,000,000	1 laporan	1,000,000,000	1 laporan	1,000,000,000	4 laporan	4,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pengembangan Daerah Irigasi Sentonorejo		1 laporan		2 Dokumen		-		-		-		-			
				Feasibility Study DI Sentonorejo		1 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan			
				DED DI Sentonorejo		1 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan			
		2.22.08.5.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional		N/A	0	15 lokasi	3,000,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15lokasi	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
D	URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik			Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	99,99 %		99,99%		99,99%		99,99%		99,99%		99,99%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	0	44.424 TOE	415,042,300	2.000 TOE	860,000,000	2.000 TOE	1,665,000,000	2.000 TOE	1,681,500,000	2.000 TOE	1,699,650,000	52.424 TOE	5,906,150,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
				Terpantainya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	0	0		100%		100%		100%		100%		100%				
		3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan		-	415,042,300	1000 TOE	860,000,000	1000 TOE	1,665,000,000	1000 TOE	1,681,500,000	1000 TOE	1,699,650,000	1000 TOE per tahun	5,906,150,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
				Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik	NA	NA		21,80%		28,72%		35,64%		42,56%		42,56%				
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Studi Potensi & Akeselerasi Penggunaan EBT di DIY	44424.18 TOE	NA	388,972,300	1 Dokumen	710.000,000	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	5,210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pembinaan, evaluasi & rekomendasi pelaks EBTKE	44424.18 TOE	NA		1 Dokumen		-		-		-		-				
				Revitalisasi dan Upgrade kapasitas PLTS Rooftop di Gd Pemerintah	44424.18 TOE	NA		1 Paket		-		-		-		-				
				Matek kebijakan EBTKE	44424.18 TOE	NA		1 Dokumen		-		-		-		-				
				Pemel. PLT EBT	44424.18 TOE	NA		1 Paket		-		-		-		-				
		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY	2 Laporan	NA	26,070,000	3 Laporan	150,000,000	3 Laporan	165,000,000	3 Laporan	181,500,000	3 Laporan	199,650,000	3 Laporan	696,150,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	22,55 %	28,19 %	4.956.715,100	46,88 %	2.540,245,000	55,00%	2.666.269,500	63,12%	2.507,896,450	71,25%	2.507,896,450	71,25%	10.222,307,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		
				Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11.955 SR	13.848 SR		14.448 SR		15.048 SR		15.648 SR		16.248 SR		16.248 SR				
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan		1 dokumen	217,720,000	1 dokumen	610,245,000	1 dokumen	666,269,500	1 dokumen	727,896,450	1 dokumen	727,896,450	1 dokumen	2,732,307,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	60 Izin	75 Izin		37,73%		42,73%		47,73%		52,73%		52,73%				
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota	332 rekomendasi teknis (Genset, IJPTL, LIT 2017-2021)	75 Izin	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
				Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota	332 rekomendasi teknis (Genset, IJPTL, LIT 2017-2021)	75 Izin		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 dokumen				
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pendataan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri belum berizin pada perusahaan di DIY	NA	75 Izin	167,720,000	2 Dokumen	560,245,000	1 Dokumen	616,269,500	1 Dokumen	677,896,450	1 Dokumen	677,896,450	5 Dokumen	2,532,307,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
				Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan di DIY	2 Laporan	75 Izin		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		20 Laporan				
				Pengelolaan aplikasi SIPGELIS	1 Aplikasi	75 Izin		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi				

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		13848 RT	4,738,995,100	600 unit	1,930,000,000	600 unit	2,000,000,000	600 unit	1,780,000,000	600 unit	1,780,000,000	16248 RT	7,490,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Updating dan Evasluasi Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan di DIY	11955 RT	13848 RT	4,738,995,100	1 Dokumen	1,930,000,000	-	2,000,000,000	-	1,780,000,000	-	1,780,000,000	-	7,490,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga	11955 RT	13848 RT		600 SR		600 SR		600 SR		600 SR		600 SR			
				Penyusunan SID Jaringan Listrik	11955 RT	13848 RT		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	8 Meningkatkan kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang			Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	19,29 %	23,85 %		40,31%		46,15%		52,00%		57,85%		57,85%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	<20%	<20%	1,158,348,100	<20%	1,085,057,000	<20%	1,884,591,450	<20%	3,462,850,595	<20%	3,569,935,654	<20%	10,002,434,699	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	10,44 %	18,9 %		45,45%		53,33%		61,21%		69,09%		69,09%			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Review Neraca Air Tanah		3	814,835,400	3 Dokumen (1. CAT Yogyakarta arta-Sleman ; 2. Kabupaten Kulon Progo: CAT Wates & CAT Menoreh; 3. Kabupaten Gunungkidul: CAT Wonosari & CAT Oyo)	458,719,500	0	1,380,000,000	0	2,207,000,000	0	2,259,000,000	6 Dokumen	6,304,719,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Review Zona Konservasi Air Tanah		3		0		2 Dokumen (1. Kabupaten Kulon Progo : CAT Wates & CAT Menoreh; 2. Kabupaten Gunungkidul : CAT Wonosari & CAT Oyo)		1 Dokumen (CAT Yogyakarta Sleman)		0		6 Dokumen			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				Review Zona Pengambilan/Zona Pemanfaatan Air Tanah		5		0		0		2 Dokumen (1. Kab. Kulon Progo; 2 Kab. Gunung kidul)		3 Dokumen (1. Kota Yogyakarta; 2. Kab. Sleman; 3. Kab. Bantul)		10 Dokumen			
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah		0		1 Dokumen (CAT Yogyakarta- Sleman)		0		1 Dokumen (CAT Wates)		0		2 Dokumen			
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
				Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
				Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan air tanah		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 dokumen	1 Laporan	407,417,700	3 Dokumen	138,337,500	2 Dokumen	984,000,000	3 Dokumen	1,623,000,000	3 Dokumen	1,785,000,000	22 Dokumen	4,530,337,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 dokumen	1 Laporan	0	1 Dokumen	20,000,000	0	0	1 Dokumen	150,000,000	0	0	2 Dokumen	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 laporan	1 Laporan	407,417,700	4 laporan	300,382,000	4 Laporan	396,000,000	4 Laporan	434,000,000	4 Laporan	474,000,000	19 Laporan	1,604,382,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		1 Laporan	343,512,700	1 Laporan	626,337,500	1 Laporan	504,591,450	1 Laporan	1,255,850,595	1 Laporan	1,310,935,654	5 Laporan	3,697,715,199	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	60 Izin	75 Izin		40,49%		45,85%		51,22%		56,59%		56,59%			
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY	2 Laporan	75 Izin	99,900,000	5 Laporan	138,337,500	5 Laporan	152,171,250	5 Laporan	167,388,375	5 Laporan	184,127,212	20 Laporan	642,024,337	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 laporan	75 Izin	98,512,700	1 Laporan	101,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	27,000,000	5 Laporan	175,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02 1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Anugerah Pengusahaan Air Tanah	NA	75 Izin	145,100,000	-	387,000,000	1 Laporan	330,420,200	1 Laporan	1,063,462,220	1 Laporan	1,099,808,442	3 Laporan	2,880,690,862	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY	2 Laporan	75 Izin		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		20 Laporan			
				Identifikasi dan Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di DIY	2 Dokumen	75 Izin		-		-		1 Dokumen		-		1 Dokumen			
				Kajian Dampak Pemanfaatan Pengusahaan Air Tanah di DIY	NA	75 Izin		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Pengelolaan Aplikasi SIPATA	1 Aplikasi	75 Izin		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,78%	7,80%	506,866,000	7,84%	4,387,692,000	7,88%	2,530,676,200	7,92%	2,483,559,820	7,96%	2,191,731,802	7,96%	11,593,659,822	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	19,87%	30,61%		33,61%		42,02%		50,42%		58,82%		58,82%			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	33 Izin	40 Izin	99,800,000	40,00%	801,990,000	46,67%	828,564,000	53,33%	911,420,400	60,00%	1,002,562,440	60,00%	3,544,536,840	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pembelian Peralatan Drone	NA	40 Izin	99,800,000	1 Buah	801,990,000	-	828,564,000	-	911,420,400	-	1,002,562,440	1 Buah	3,544,536,840	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah izin Usaha Pertambangan di DIY	NA	40 Izin		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan			
				Identifikasi Penambangan Tanpa Izin di DIY	1 Dokumen	40 Izin		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan			
				Evaluasi Kondisi Lahan Kegiatan Pertambangan di DIY	NA	40 Izin		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen rekomendasi dan informasi izin pengusahaan pertambangan yang sesuai ketentuan		1 dokumen	383,812,000	1 dokumen	1,370,702,000	1 dokumen	1,417,772,200	1 dokumen	1,279,549,420	1 dokumen	1,047,504,362	4 dokumen	5,115,527,982	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	33 Izin	40 Izin		40,00%		46,67%		53,33%		60,00%		60,00%			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03 .1.03.0 3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3 dokumen	40 Izin	0	5 dokumen	900.000,000	4 dokumen	800.000,000	4 dokumen	600.000,000	3 dokumen	300.000,000	16 dokumen	2,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.03 .1.03.0 4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY	2 Laporan	40 Izin	383,812,000	4 Laporan	470,702,000	4 Laporan	617,772,200	4 Laporan	679,549,420	4 Laporan	747,504,362	16 Laporan	2,515,527,982	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Anugerah Usaha Pertambangan	NA	40 Izin		-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan			

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
				Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Usaha Pertambangan di DIY	2 Laporan	40 Izin			4 Laporan			4 Laporan			4 Laporan			16 Laporan			
				Pengelolaan Aplikasi SIPBANG	1 Aplikasi	40 Izin			1 Aplikasi			1 Aplikasi			1 Aplikasi			1 Aplikasi			
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan		1 dokumen	23,254,000	1 dokumen	2,140,000,000	1 dokumen	201,840,000	1 dokumen	201,840,000	1 dokumen	41,840,000	4 dokumen	2,585,520,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral			
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 dokumen	1 dokumen	23,254,000	5 dokumen	1,740,000,000	5 dokumen	1,840,000	2 dokumen	1,840,000	2 dokumen	1,840,000	14 dokumen	1,745,520,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		DIY	
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	2 laporan	1 dokumen	0	1 laporan	400,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	40,000,000	4 laporan	840,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral		DIY	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	33 Izin	40 Izin	0	40,00%	75,000,000	46,67%	82,500,000	53,33%	90,750,000	60,00%	99,825,000	60,00%	348,075,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY	NA	40 Izin	0	4 Laporan	75,000,000	4 Laporan	82,500,000	4 Laporan	90,750,000	4 Laporan	99,825,000	16 Laporan	348,075,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY	NA	40 Izin		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan			
E NON BIDANG																			
	9 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A		A		A		A		A		A		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,29	94,29	53,293,290,294	94,29	68,604,014,598	94,29	77,006,558,995	94,29	91,102,112,625	94,29	108,163,427,461	94,29	344,876,113,679	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	555,061,000	100 %	410,000,000	100 %	422,500,000	100 %	482,500,000	100 %	745,000,000	100 %	2,060,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	100 %	445,061,000	6 dokumen	300,000,000	6 dokumen	300,000,000	6 dokumen	350,000,000	6 dokumen	400,000,000	6 dokumen	1,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD	1 dokumen	100 %	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	17,500,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan-SKPD	1 dokumen	100 %	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	87,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD		100 %	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	17,500,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	277,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan-SKPD	1 dokumen	100 %	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	27,500,000	1 dokumen	95,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	100 %	40,000,000	3 dokumen	40,000,000	3 dokumen	42,500,000	3 dokumen	45,000,000	3 dokumen	47,500,000	3 dokumen	175,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	44,411,311,694	100 %	48,833,494,863	100 %	59,048,479,184	100 %	71,406,788,833	100 %	86,358,339,990	100 %	265,647,102,870	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01 .1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	100 %	44,149,031,694	1 tahun	48,563,934,863	1 tahun	58,762,361,184	1 tahun	71,102,457,033	1 tahun	86,033,973,010	1 tahun	264,462,726,090	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	100 %	152,280,000	1 tahun	148,560,000	1 tahun	153,018,000	1 tahun	157,921,800	1 tahun	163,315,980	1 tahun	622,815,780	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan audited, laporan tahunan keuangan dan aset	3 laporan	100 %	40,000,000	3 laporan	44,000,000	3 laporan	48,400,000	3 laporan	53,240,000	3 laporan	58,564,000	3 laporan	204,204,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	24 laporan	100 %	70,000,000	24 laporan	77,000,000	24 laporan	84,700,000	24 laporan	93,170,000	24 laporan	102,487,000	24 laporan	357,357,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	91,740,000	100 %	116,340,000	100 %	117,660,000	100 %	119,112,000	100 %	120,709,200	100 %	473,821,200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01 .1.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Jasa Pengelola Barang	1 tahun	100 %	91,740,000	1 tahun	116,340,000	1 tahun	117,660,000	1 tahun	119,112,000	1 tahun	120,709,200	1 tahun	473,821,200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,215,452,000	100 %	1,761,508,300	100 %	1,911,541,500	100 %	2,102,695,650	100 %	2,310,460,515	100 %	8,086,205,965	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01 .1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik	70 jenis	100 %	94,777,000	65 jenis	106,597,000	66 jenis	117,256,700	66 jenis	128,982,370	66 jenis	139,375,907	66 jenis	492,211,977	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK (ATK, ATK Penataan Arsip, Kertas)	3 kelompok	100 %	202,473,000	3 kelompok	201,729,700	3 kelompok	129,554,920	3 kelompok	142,510,412	3 kelompok	156,761,453	3 kelompok	630,556,485	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	0	100 %	202,906,000	6 jenis	149,620,700	6 jenis	150,287,500	6 jenis	165,316,250	6 jenis	181,847,875	6 jenis	647,072,325	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Barang cetakan, penggandaan dan penggandaan penataan arsip)	3 kelompok	100 %	244,662,000	3 kelompok	135,468,600	3 kelompok	149,015,680	3 kelompok	163,917,248	3 kelompok	180,308,973	3 kelompok	628,710,501	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku bacaan perpustakaan	1 jenis	100 %	10,920,000	1 jenis	22,645,300	2 jenis	24,915,000	2 jenis	27,406,500	2 jenis	30,147,150	2 jenis	105,113,950	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUPESDM DIY	1 tahun	100 %	459,714,000	1 tahun	1,145,447,000	1 tahun	1,340,511,700	1 tahun	1,474,562,870	1 tahun	1,622,019,157	1 tahun	5,582,540,727	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	269,271,000	100 %	2,619,305,900	100 %	1,084,945,400	100 %	1,193,439,940	100 %	1,312,783,934	100 %	6,210,475,174	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	100 %	0	10 unit	1,930,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya pengadaan alat besar	0	100 %	170,020,000	1 unit	279,000,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	0	100 %	65,200,000	5 jenis	341,645,000	5 jenis	332,909,500	5 jenis	366,200,450	5 jenis	402,820,495	5 jenis	1,443,575,445	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100 %	34,051,000	11 jenis	68,660,900	11 jenis	752,035,900	11 jenis	827,239,490	11 jenis	909,963,439	11 jenis	2,557,899,729	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	3,895,047,600	100 %	9,866,240,535	100 %	11,294,498,126	100 %	12,423,947,938	100 %	13,666,342,732	100 %	47,251,029,331	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 tahun	100 %	5,000,000	1 tahun	10,000,000	1 tahun	11,000,000	1 tahun	12,100,000	1 tahun	13,310,000	1 tahun	46,410,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

Rencana Strategis Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01 .1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	100 %	1,514,970,000	1 tahun	5,884,360,345	1 tahun	6,472,796,380	1 tahun	7,120,076,017	1 tahun	7,832,083,619	1 tahun	27,309,316,361	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	100 %	2,375,077,600	1 tahun	3,971,880,190	1 tahun	4,810,701,746	1 tahun	5,291,771,921	1 tahun	5,820,949,113	1 tahun	19,895,302,970	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2,855,407,000	100 %	4,997,125,000	100 %	3,126,934,785	100 %	3,373,628,264	100 %	3,649,791,090	100 %	15,147,479,139	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01 .1.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	100 %	903,157,000	1 tahun	1,427,376,500	1 tahun	1,570,115,800	1 tahun	1,727,127,380	1 tahun	1,899,840,118	1 tahun	6,624,459,798	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	19 jenis	100 %	252,250,000	16 jenis	344,748,500	16 jenis	416,818,985	16 jenis	458,500,884	16 jenis	504,350,972	16 jenis	1,724,419,341	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01 .1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 gedung	100 %	1,700,000,000	10 gedung	3,225,000,000	10 gedung	1,140,000,000	10 gedung	1,188,000,000	10 gedung	1,245,600,000	10 gedung	6,798,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang yang dirinci menurut sub urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. 1.Target Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Awal (Target 2022)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	94,14 %	95,28%	95,8%	96,48%	97,15%	97,15%
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%	94,25 %	94,9%	96,07%	96,54%	97,23%	97,23%
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%	46,38%	70,53%	80,19%	89,86%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	%	97.24%	97.80%	98.76%	99.22%	100%	100%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	99,57 %	57,12%	71,41%	85,71%	100%	100%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	%	95,65%	96,12%	96,59%	97,05%	97,53%	97,53%
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%

NO	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Awal (Target 2022)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
8	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%	23,85 %	40,31%	46,15%	52,00%	57,85%	57,85%
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis

2023-2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telp. (0274) 589091
Website: www.dpupesdm.jogjaprov.go.id
Email: dpupesdm@jogjaprov.go.id